Sabda, Logika Murni, dan Arsitektur Tata Kelola Kebenaran: Mengapa Logika Tidak Dapat Memerintah Sendirian dan Mengapa Tata Kelola Kebenaran Memerlukan Sabda

Ade Zaenal Mutaqin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Penulis korespondensi: suratkiade@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4114-3679

Abstrak

Artikel ini berargumen bahwa klaim-klaim kontemporer tentang kedaulatan logika murni dalam sains, hukum, dan teknologi tidak dapat dipertahankan begitu struktur internalnya dibuat eksplisit. Berangkat dari genealogi dari positivisme hingga saintisme kontemporer, artikel ini merekonstruksi logika murni sebagai sebuah arsitektur yang ditandai oleh empat tesis struktural: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat fakta–nilai, serta penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat manusia. Artikel ini kemudian menunjukkan bahwa arsitektur tersebut menghadapi tiga kegagalan struktural. Pertama, norma-norma dasar praksis rasional, seperti kejujuran, keterbukaan terhadap kritik, dan orientasi pada kebenaran, tidak dapat diberi landasan oleh prosedur-prosedur yang justru mereka mungkinkan tanpa jatuh ke dalam regres, sirkularitas, atau stipulasi. Kedua, pembedaan ketat antara fakta dan nilai runtuh ketika ditelaah dalam praktik nyata penyelidikan dan pengambilan keputusan, di mana penilaian nilai dan konsep-konsep padat (thick concepts) seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan martabat tertanam dalam pemilihan masalah, pembentukan konsep, dan standar evidensi. Ketiga, penjelasan tentang martabat dan telos yang berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian tidak mampu membenarkan bahasa tanpa syarat tentang nilai yang inheren dan tak dapat dicabut serta batas-batas yang tak boleh dilanggar, yang terus digunakan oleh kerangka hukum dan etika. Untuk menjawabnya, artikel ini mengajukan The Cohesive Tetrad (TCT) sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran. Dalam arsitektur ini, Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, bersifat primer, sementara logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment diberi peran-peran yang berbeda namun saling bergantung. Artikel ini menunjukkan bagaimana arsitektur tersebut dapat membingkai ulang perdebatan tentang rasionalitas, martabat manusia, dan desain institusional dalam hukum dan kecerdasan buatan, serta berargumen bahwa arsitektur ini menyediakan penjelasan yang lebih koheren atas norma-norma yang sebenarnya sudah dipraanggapkan oleh rezim-rezim kebenaran kontemporer.

Kata kunci: *tata kelola kebenaran; martabat manusia; Sabda; logika; rasionalitas hukum; tata kelola kecerdasan buatan; Qualia; Mistika; Akhlak; Intention-Trace Alignment; The Cohesive Tetrad.*

1. Pendahuluan

1.1 Otoritas rasional, martabat, dan ketergantungan yang tak terlihat

Institusi modern berbicara dengan dua suara. Dengan suara pertama, mereka menampilkan diri sebagai entitas yang diatur oleh evidensi, netralitas, dan prosedur formal. Komunitas ilmiah menggambarkan otoritas mereka dalam istilah metode dan telaah sejawat. Pengadilan dan badan regulasi meletakkan legitimasi mereka pada penalaran dari fakta dan hukum. Komunitas teknis membingkai pekerjaan mereka sebagai perancangan alat yang netral nilai dan dapat melayani setiap tujuan yang wajar (Haack, 2003; Douglas, 2009; Rea, 2018). Suara ini menyiratkan bahwa logika murni, dipadukan dengan investigasi empiris, sudah cukup untuk mengatur praksis rasional dalam masyarakat majemuk.

Dengan suara kedua, institusi yang sama bergantung pada kosakata martabat manusia, hak-hak dasar, batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan kebaikan-kebaikan yang tak dapat dinegosiasikan. Instrumen hak asasi manusia menegaskan martabat setiap orang yang inheren dan tak dapat dicabut (UN, 1948; Waldron, 2012). Etika kedokteran dan penelitian menuntut bahwa pribadi tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana, bahkan bila perlakuan demikian akan menghasilkan manfaat yang besar (Kant, 1996; Beauchamp and Childress, 2019). Pengadilan mengerahkan konsep-konsep seperti perlakuan yang merendahkan martabat, diskriminasi, dan perlindungan yang setara, yang melampaui sekadar efisiensi atau preferensi. Perdebatan tentang kecerdasan buatan kini secara rutin merujuk pada keadilan (fairness), akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip-prinsip penuntun (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Diambil secara terpisah, masing-masing suara memiliki kelayakan sendiri. Namun bersama-sama, keduanya menimbulkan ketegangan. Jika otoritas rasional sepenuhnya diletakkan pada prosedur yang memenuhi tuntutan logika murni, tidak jelas bagaimana nada tanpa syarat dari bahasa yang berpusat pada martabat dapat dibenarkan. Jika martabat dan telos lebih dari sekadar ringkasan pragmatis dari keberhasilan koordinasi, maka logika murni yang beroperasi dalam sebuah horizon naturalistik tampaknya secara diam-diam bergantung pada suatu sumber norma dan tujuan yang tidak diakuinya. Artikel ini mengekspisitkan ketegangan tersebut dan berargumen bahwa ketegangan itu tidak dapat diselesaikan tanpa mengonfigurasi ulang arsitektur dasar tata kelola kebenaran.

1.2 Dari teknik ke arsitektur: merekonstruksi logika murni

Langkah pertama adalah berpindah dari memandang logika sebagai sekumpulan teknik ke memandangnya sebagai bagian dari sebuah arsitektur. Dengan arsitektur tata kelola kebenaran saya maksudkan sebuah pola praanggapan tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan, bagaimana alasan-alasan seharusnya ditimbang, dan di mana otoritas normatif ditempatkan. Logika murni, dalam pengertian yang relevan di sini, bukan sekadar validitas deduktif atau koherensi probabilistik. Ia adalah sebuah himpunan komitmen yang muncul secara historis dari positivisme, empirisme, dan berbagai bentuk naturalisme, yang kini membentuk cara institusi memahami diri mereka.

Dengan menumpu pada genealogi ini, saya merekonstruksi logika murni sebagai sesuatu yang diorganisasikan oleh empat tesis struktural. Pertama adalah saintisme, pandangan bahwa sains

alam merupakan rute paling serius, dan mungkin satu-satunya rute serius, menuju pengetahuan tentang realitas, dan bahwa ranah lain paling jauh hanya menghasilkan ekspresi atau interpretasi (Stenmark, 2001; Haack, 2003). Kedua adalah evidensialisme keras, menurutnya suatu keyakinan hanya dapat diterima secara rasional bila didukung oleh evidensi yang secara prinsip dapat diakses dan dinilai oleh setiap penyelidik yang kompeten (Clifford, 1877; Conee and Feldman, 2004). Ketiga adalah pemisahan ketat fakta–nilai yang menempatkan fakta pada sains dan nilai pada politik, budaya, atau keyakinan privat (Hume, 1978; Putnam, 2002). Keempat adalah penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat, yang berusaha menafsirkan kedua gagasan ini dalam istilah kapasitas, sejarah evolusioner, atau kesepakatan rasional, tanpa merujuk pada norma tataran lebih tinggi apa pun (Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Tesis-tesis ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, dan tidak semua pembela rasionalitas menganutnya dalam bentuk identik. Namun, bila diambil bersama, tesis-tesis itu menggambarkan suatu gambaran yang dapat dikenali yang memengaruhi bagaimana banyak pelaku kontemporer berbicara tentang evidensi, netralitas, dan nalar publik. Bagian 2 mengembangkan rekonstruksi ini secara lebih rinci, menunjukkan bagaimana komitmen-komitmen tersebut saling menopang dan mengapa tampak menarik sebagai cara melindungi penyelidikan dari dogma dan kehidupan publik dari konflik sektarian.

1.3 Tiga kegagalan struktural logika murni

Begitu logika murni diperlakukan sebagai sebuah arsitektur alih-alih sebagai kumpulan longgar kebajikan, menjadi mungkin untuk menanyakan apakah arsitektur ini dapat memenuhi tuntutan yang ia bebankan pada dirinya sendiri. Klaim sentral artikel ini adalah bahwa ia tidak dapat melakukannya. Tiga kegagalan struktural terutama penting.

Kegagalan pertama menyangkut pemendasaran diri (self-grounding). Logika murni bergantung pada norma dasar praksis rasional, termasuk kewajiban untuk menghindari penipuan, menghormati evidensi, dan tetap terbuka terhadap koreksi. Namun ketika ia mencoba membenarkan norma-norma ini hanya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya sendiri, ia berhadapan dengan trilema yang sudah dikenal: regres, sirkularitas, atau stipulasi (BonJour, 1985; Klein, 1998). Entah setiap norma harus didukung oleh norma lebih lanjut tanpa akhir, atau praksis dibenarkan oleh keberhasilannya dengan cara yang sudah mempraanggapkan norma-norma yang diperselisihkan, atau sebagian norma harus sekadar dinyatakan sebagai dasar. Perdebatan dalam epistemologi kebajikan (virtue epistemology) menegaskan bahwa disposisi karakter seperti kejujuran intelektual dan kecintaan pada kebenaran tidak dapat diturunkan dari prosedur netral, melainkan merupakan prasyarat bagi penyelidikan yang sungguh-sungguh (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011; Roberts and Wood, 2007). Bagian 3 berargumen bahwa logika murni, pada istilah-istilahnya sendiri, tidak dapat menyediakan jenis pemendasaran yang secara implisit dijanjikannya.

Kegagalan kedua menyangkut distingsi fakta–nilai. Filsuf sains dan epistemolog sosial telah menunjukkan bahwa nilai memasuki penelitian pada banyak tingkatan, mulai dari pemilihan masalah hingga spesifikasi konsep dan standar evidensi (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009). Konsep-konsep padat (thick concepts) seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan martabat, yang sentral dalam hukum dan etika, memadukan deskripsi dan evaluasi dengan cara yang menolak pemisahan (Williams, 1985; MacIntyre, 1988). Bagian 4 berargumen bahwa normativitas bukan tambahan opsional, melainkan terbenam dalam praksis yang oleh logika murni digambarkan sebagai faktual dan bebas nilai.

Kegagalan ketiga menyangkut martabat dan telos. Penjelasan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian menangkap aspek penting kehidupan moral kita, tetapi tidak satu pun menopang klaim kuat tentang martabat yang inheren dan tak dapat dicabut serta batas-batas yang tak boleh dilanggar yang digunakan dalam bahasa hak asasi manusia dan banyak putusan hukum (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Ketika ditelaah secara cermat, penjelasan-penjelasan ini cenderung merelatifkan atau memperlemah aksioma yang ingin mereka benarkan. Bagian 5 merumuskan seperangkat aksioma martabat manusia minimal yang sudah tersirat dalam praktik dan menunjukkan bahwa aksioma-aksioma tersebut menunjuk melampaui horizon yang sepenuhnya naturalistik.

1.4 Sabda dan The Cohesive Tetrad

Jika norma-norma praksis rasional dan aksioma martabat manusia minimal lebih dari sekadar konvensi lokal, maka harus ada suatu sumber yang meletakkan dasar bagi norma-norma tersebut dan menyapa pelaku rasional dengan daya ikat. Dalam artikel ini, saya menamai sumber itu Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Menyebut Sabda berarti mengklaim bahwa manusia bukan pembawa kebetulan dari hasrat akan kebenaran dan keadilan, melainkan makhluk yang dipanggil dan dikenal oleh suatu realitas yang mendahului dan melampaui mereka. Itu berarti menegaskan bahwa ada cara memperlakukan pribadi yang pada dirinya sendiri tidak pantas, bukan sekadar suboptimal relatif terhadap tujuan yang berubah-ubah.

Penghadiran Sabda tidak dimaksudkan untuk menutup pertanyaan. Sebaliknya, ia menyiapkan panggung bagi sebuah arsitektur yang lebih kompleks di mana logika dibebaskan dari tugas mustahil untuk memendasarkan dirinya sendiri, tetapi tetap diberi mandat untuk menguji respons-respons manusia terhadap Sabda dari segi koherensi dan kejujuran. The Cohesive Tetrad (TCT) adalah nama yang saya berikan kepada arsitektur tersebut. Di samping Sabda dan logika, arsitektur ini mengakui Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention–Trace Alignment sebagai ranah-ranah kebenaran yang berbeda yang harus diintegrasikan dalam setiap rezim pengetahuan yang bertanggung jawab.

Bagian 6 memaparkan arsitektur ini secara rinci. Sabda menempati puncak sebagai sumber norma dan telos. Logika berfungsi sebagai organ disipliner klarifikasi dan kritik. Qualia menangkap bagaimana pengaturan kelembagaan dialami dari dalam. Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menyangkut orientasi niat epistemik. Akhlak menggambarkan konfigurasi moral para pelaku pengetahuan. Intention–Trace Alignment, the degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace dalam praksis institusional, mengukur derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak moral epistemik dalam praktik kelembagaan. Bagian 6 juga mengisyaratkan bagaimana arsitektur ini dapat dipakai untuk membaca ulang perdebatan dalam hukum dan kecerdasan buatan, dua ranah di mana batas-batas logika murni dan urgensi perhatian terhadap martabat tampak secara khusus (Habermas, 1996; Dworkin, 1986; Fricker, 2007; Medina, 2013; Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; UNESCO, 2021).

Bagian terakhir mengaitkan kritik atas logika murni dengan usulan The Cohesive Tetrad, dan menunjukkan bagaimana pengakuan eksplisit atas Sabda dapat berdampingan dengan, dan bahkan menguatkan, praksis logis dan empiris yang ketat dalam institusi-institusi yang bercita-cita menghormati sekaligus kebenaran dan martabat manusia.

2. Merekonstruksi ideologi logika murni

Jika kritik yang dikembangkan dalam artikel ini hendak adil, ia tidak boleh dimulai dari sebuah karikatur. Logika murni terlebih dahulu harus dipresentasikan dalam bentuk terkuat yang secara wajar dapat ia klaim. Hanya dengan demikian batas-batasnya dapat dibuka tanpa ketidakadilan. Karena itu, bagian ini merekonstruksi ideologi logika murni sebagai sebuah proyek yang serius dan koheren secara internal, yang muncul dari suatu genealogi intelektual yang dapat dikenali dan yang terus membentuk pemahaman diri institusi-institusi kontemporer.

Saya menggunakan istilah ideologi di sini dalam makna deskriptif. Tujuannya bukan menuduh para pendukungnya bersikap tidak tulus, melainkan menyoroti bahwa logika murni berfungsi sebagai sebuah arsitektur praanggapan tentang apa yang dihitung sebagai pengetahuan, bagaimana alasan-alasan seharusnya ditimbang, dan di mana otoritas ditempatkan. Banyak dari apa yang ditegaskan ideologi ini merupakan capaian nyata. Justru karena itu, pertanyaan tentang batas-batasnya menjadi penting.

2.1 Genealogi dan pemahaman diri logika murni

Aspirasi yang saya sebut logika murni berdiri dalam kesinambungan dengan beberapa arus besar dalam pemikiran modern. Kaum positivis awal seperti Auguste Comte berpendapat bahwa umat manusia seharusnya melampaui tahap teologis dan metafisis dan memasuki tahap positif, di mana pengetahuan yang sejati diletakkan pada observasi dan keteraturan yang bersifat hukum, alih-alih pada wahyu atau spekulasi (Comte, 1974). Kaum positivis logis meradikalkan dorongan ini dengan mengikat makna kognitif secara ketat pada verifikasi atau relasi-relasi formal di antara proposisi, sehingga banyak klaim metafisis dan teologis tradisional dinyatakan secara harfiah tidak bermakna alih-alih sekadar salah (Ayer, 1936; Carnap, 1937).

Meskipun positivisme logis klasik kehilangan banyak dominasinya setelah pertengahan abad, intuisi sentralnya bertahan dalam bentuk-bentuk empirisme dan naturalisme yang lebih lentur. Saintisme, khususnya, dapat dipahami sebagai keturunan positivisme yang tidak lagi bersikeras pada prinsip verifikasi yang ketat, tetapi tetap memandang sains alam sebagai cara paling serius, dan mungkin satu-satunya cara serius, untuk mengetahui realitas (Stenmark, 2001; Haack, 2003). Klaim-klaim yang tidak dapat diintegrasikan ke dalam suatu gambaran yang secara luas ilmiah didelegasikan ke ranah preferensi, latar pengasuhan, atau identitas.

Pada saat yang sama, filsafat analitik bahasa dan pikiran mengembangkan penjelasan yang kian canggih tentang makna, referensi, dan rasionalitas, yang kerap menguatkan, bukan melemahkan, daya tarik sebuah pandangan yang secara luas saintistik. Metafisika naturalistik berupaya membangun ontologi yang tidak melampaui apa yang tampak dituntut oleh sains yang mapan (Rea, 2018). Di banyak kalangan, pembicaraan tentang wahyu, perintah sakral, dan norma transenden diperlakukan, paling jauh, sebagai cara simbolik untuk mengisyaratkan keprihatinan-keprihatinan manusia yang mungkin pada akhirnya dapat dideskripsikan ulang dalam istilah naturalistik.

Latar filosofis ini mengalir langsung ke dalam deskripsi diri institusional kontemporer. Organisasi ilmiah menggambarkan pekerjaan mereka sebagai berbasis evidensi dan netral secara metodologis terhadap nilai-nilai terakhir. Pengadilan dan badan regulasi menampilkan diri sebagai terikat oleh fakta dan hukum, bukan oleh keyakinan komunitas tertentu. Komunitas

teknis berbicara tentang alat bebas nilai yang dapat melayani tujuan apa pun yang wajar. Bahkan keterlibatan kritis dengan institusi-institusi ini kerap berbagi praanggapan dasar bahwa yang pada akhirnya penting adalah apakah evidensi dan logika telah dihormati dengan layak.

Tentu saja, tidak ada ilmuwan atau hakim yang bekerja dengan seperangkat tesis positivis lengkap di benaknya. Kebanyakan akan menolak klaim-klaim terkuat verifikasionisme awal. Namun sebuah gambaran umum tentang otoritas rasional tetap bertahan. Dalam gambaran ini, pengetahuan sejati adalah produk metode-metode yang bersifat publik, empiris, dan didisiplinkan secara logis. Komitmen normatif dan metafisis mungkin berperan dalam motivasi individual, tetapi tidak dihitung sebagai pengetahuan dalam pengertian keras yang sama. Dengan cara ini, logika murni berfungsi sebagai cita-cita regulatif yang membentuk argumen mana yang tampak sah secara intelektual dan mana yang disisihkan sebagai privat atau sektarian.

Dilihat dari dalam genealogi ini, logika murni bukan preferensi sewenang-wenang. Ia adalah upaya yang dapat dipahami secara historis untuk melindungi penyelidikan dari penyalahgunaan dogmatis, untuk memastikan bahwa otoritas tunduk pada pengujian, dan untuk menciptakan ruang bersama di mana orang dengan keyakinan berbeda dapat bernalar bersama. Setiap arsitektur alternatif tata kelola kebenaran yang mengabaikan motif-motif ini akan bersikap tidak bertanggung jawab. Tugasnya adalah melihat di mana cita-cita ini memperjelas dan di mana ia melampaui batas.

2.2 Empat tesis struktural logika murni

Di bawah keragaman posisi yang merujuk pada logika murni, dapat dikenali suatu gugus tesis struktural yang cenderung berjalan bersama. Tesis-tesis ini tidak selalu dirumuskan secara eksplisit, tetapi dapat diekstraksi dari cara rasionalitas, evidensi, dan otoritas digambarkan. Untuk kepentingan artikel ini, empat tesis semacam itu bersifat sentral.

Tesis pertama adalah saintisme. Dalam bentuk kuatnya, saintisme mengklaim bahwa sains alam merupakan, dan mungkin satu-satunya, jalan otoritatif menuju pengetahuan tentang realitas (Stenmark, 2001). Ranah lain, seperti etika, teologi, atau estetika, mungkin menyediakan makna atau ekspresi, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan dalam pengertian kokoh yang sama. Dalam bentuk-bentuk yang lebih lemah, saintisme memperlakukan metode ilmiah sebagai model baku bagi semua penyelidikan serius, bahkan ketika metode itu harus diadaptasi. Dalam kedua versi, apa yang dihitung sebagai real erat kaitannya dengan apa yang dapat diselidiki dengan konsep dan instrumen sains (Haack, 2003; Rea, 2018).

Tesis kedua adalah evidensialisme keras. Dalam semboyan klasik yang terkait dengan W. K. Clifford, adalah salah untuk mempercayai apa pun berdasarkan evidensi yang tidak memadai (Clifford, 1877). Para evidensialis kontemporer kerap memurnikannya menjadi klaim bahwa suatu keyakinan dibenarkan secara epistemik hanya jika didukung oleh keseluruhan evidensi yang tersedia, dipahami dalam istilah yang secara prinsip dapat diakses secara intersubjektif dan terbuka untuk dinilai oleh pihak lain (Conee and Feldman, 2004). Sementara sedikit orang yang akan menyangkal bahwa evidensi itu penting, evidensialisme keras melangkah lebih jauh dengan memperlakukan rujukan pada wahyu, tradisi, atau otoritas sebagai sesuatu yang secara epistemik mencurigakan kecuali bila dapat diterjemahkan ke dalam istilah evidensial yang memenuhi standarnya.

Tesis ketiga adalah pemisahan ketat antara fakta dan nilai. Dalam pandangan ini, fakta menggambarkan bagaimana dunia apa adanya, sedangkan nilai mengekspresikan bagaimana dunia seharusnya atau apa yang layak dikejar. Fakta, dikatakan, adalah ranah sah sains dan dapat diselidiki terlepas dari komitmen nilai tertentu. Nilai muncul dari preferensi, emosi, atau konvensi sosial dan karenanya harus ditangani oleh politik, budaya, atau pilihan privat. Pembelahan tajam ini berpengaruh setidaknya sejak distingsi terkenal Hume antara is dan ought, dan ia terus membentuk cara wacana publik diorganisasikan (Hume, 1978; Putnam, 2002). Bagi ideologi logika murni, keuntungannya jelas. Dengan membatasi otoritas rasional pada pertanyaan faktual, menjadi mungkin untuk mengklaim netralitas di antara sistem nilai yang saling bersaing.

Tesis keempat adalah penjelasan naturalistik tentang telos dan martabat. Ketika logika murni tidak dapat menghindari pembicaraan tentang tujuan dan harga diri (worth), ia berupaya menafsirkan keduanya sedemikian rupa sehingga cocok dengan gambaran dunia yang imanen dan naturalistik. Telos, atau tujuan, ditafsirkan ulang sebagai pola yang muncul dari proses evolusioner, sebagai keluaran pilihan rasional di bawah kendala tertentu, atau sebagai produk kontrak sosial di antara pelaku yang bebas dan setara (Rawls, 1999; Habermas, 1996). Martabat manusia ditafsirkan ulang sebagai singkatan bagi seperangkat perlindungan yang secara sosial berguna untuk menopang kerja sama dan stabilitas jangka panjang, atau sebagai komitmen yang telah mengakar secara kultural yang otoritasnya bersumber dari sejarah bersama alih-alih dari norma tataran lebih tinggi mana pun (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Dalam pandangan semacam ini, bahasa tentang martabat yang inheren dan tak dapat dicabut dalam instrumen hak asasi manusia dipertahankan, tetapi bobot metafisisnya dialihkan kepada narasi evolusioner, model kontraktual, atau penjelasan fungsionalis.

Keempat tesis ini secara konseptual berbeda, namun saling memperkuat. Saintisme dan evidensialisme keras mendorong pemisahan fakta–nilai yang ketat, karena hanya apa yang dapat dibawa ke bawah kriteria evidensial yang dihitung sebagai sepenuhnya rasional. Pemisahan fakta–nilai, pada gilirannya, memberi tekanan pada penjelasan telos dan martabat untuk bersifat naturalistik, sebab setiap rujukan pada norma tataran lebih tinggi akan melanggar batas yang telah dinyatakan. Begitu telos dan martabat dinaturalkan, saintisme tampak kian dibenarkan, karena tidak ada lagi yang tersisa di luar ruang yang dapat, secara prinsip, dijangkau oleh metode ilmiah dan quasi-ilmiah.

Dalam praktik, banyak filsuf dan praktisi menganut versi lunak atau hibrida dari tesis-tesis ini. Sebagian membela saintisme moderat sambil menolak evidensialisme keras. Yang lain mengkritik dikotomi fakta–nilai sambil tetap menegakkan semacam naturalisme tentang normativitas (Putnam, 2002). Tujuan di sini bukan mengeruntuhkan semua posisi menjadi satu slogan, melainkan mengidentifikasi suatu konfigurasi yang dapat dikenali dalam pemahaman diri institusi yang menganggap diri mereka terutama diatur oleh logika murni. Konfigurasi itulah, bukan satu tesis tunggal, yang diperlakukan artikel ini sebagai sebuah arsitektur tata kelola kebenaran.

2.3 Logika murni sebagai arsitektur tata kelola kebenaran

Begitu tesis-tesis struktural ini berada pada tempatnya, logika murni menjadi lebih dari sekadar kebajikan epistemik. Ia berfungsi sebagai arsitektur yang mengurutkan pertanyaan, mengalokasikan otoritas, dan membentuk antropologi implisit institusi.

Dalam hal pengurutan pertanyaan, pemisahan fakta–nilai mendorong suatu model dua tingkat. Pertama, pertanyaan faktual diselesaikan oleh sains, analisis pakar, atau prosedur berbasis evidensi lainnya. Hanya setelah fakta-fakta diperoleh menjadi pantas untuk menanyakan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam banyak konteks kebijakan dan hukum, hal ini tercermin dalam retorika berurutan. Para pakar diberi tugas menemukan apa yang ada, sementara pejabat terpilih atau pemangku kepentingan diminta berunding tentang nilai. Logika dihadirkan sebagai penengah di kedua tahap, memastikan bahwa kesimpulan mengikuti fakta pada tingkat pertama dan mengikuti tujuan yang dinyatakan pada tingkat kedua (Douglas, 2009; Anderson, 2004).

Dalam hal alokasi otoritas, saintisme dan evidensialisme keras mendorong institusi untuk membingkai legitimasi mereka dalam istilah prosedur, bukan pribadi atau teks. Komunitas ilmiah, pengadilan, lembaga regulasi, dan bahkan badan penetap standar teknis menggambarkan diri sebagai pelayan metode impersonal. Kepercayaan publik diupayakan dengan menekankan kepatuhan pada protokol pengumpulan data, telaah sejawat, dan penalaran yuridis, alih-alih dengan merujuk kepada kebijaksanaan, karakter, atau wahyu. Rujukan pada Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diperlakukan sebagai motivasi privat yang mungkin dihormati tetapi tidak dapat dihitung sebagai alasan publik dalam public reason Habermasian atau overlapping consensus Rawlsian (Rawls, 1999; Habermas, 1996).

Dalam hal antropologi, arsitektur logika murni cenderung memandang manusia terutama sebagai pembawa kapasitas kognitif dan kepentingan. Individu adalah agen yang membentuk keyakinan, memperbarui kadar kepercayaan (credences), memaksimalkan utilitas, dan merundingkan kesepakatan. Dimensi moral dan spiritual mereka, bila diakui, ditafsirkan ulang sebagai faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku. Manusia perlu dilindungi sejauh perlindungan tersebut dituntut oleh kerja sama yang stabil, oleh kesepakatan rasional di bawah kondisi yang adil, atau oleh evidensi empiris tentang kesejahteraan (Dworkin, 1986; Nussbaum, 2006). Ketika martabat manusia dirujuk dalam hukum dan kebijakan, ia kerap ditafsirkan dalam terang ini, sebagai ringkasan tingkat tinggi dari alasan-alasan fungsional alih-alih sebagai respons langsung terhadap Sabda.

Arsitektur ini melakukan kerja nyata. Dalam filsafat sains, ia mendorong fokus pada kriteria demarkasi dan pada pengaturan nilai dalam penyelidikan, bukan pada pertanyaan tentang tujuan terakhir (Douglas, 2009; Putnam, 2002). Dalam hukum, ia menopang visi proseduralis tentang legitimasi, di mana kesetiaan pada aturan dan keadilan proses dipandang utama (Habermas, 1996; Dworkin, 1986). Dalam tata kelola teknologi, khususnya etika kecerdasan buatan, ia menjadi dasar upaya mendefinisikan keadilan (fairness), akuntabilitas, dan transparansi dalam istilah yang meminimalkan ketergantungan pada tradisi etis atau religius tertentu (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Bagi banyak praktisi, konfigurasi ini memiliki keunggulan moral karena tampak kurang berbahaya dibanding alternatifnya. Ia seolah-olah menawarkan cara hidup bersama dalam masyarakat majemuk tanpa perlu bersepakat tentang hal-hal terakhir. Ia menjanjikan pengekangan terhadap seruan otoritarian atas nama wahyu dan pendisiplinan penggunaan kekuasaan melalui prosedur yang dapat diperiksa secara publik. Karena itulah logika murni sering dialami sebagai kekuatan yang melindungi, dan kritik terhadapnya pada pandangan pertama dapat tampak seperti ancaman terhadap capaian yang diperoleh dengan susah payah.

Pertanyaan yang dikejar dalam sisa artikel ini adalah apakah arsitektur ini dapat memenuhi apa yang secara implisit dijanjikannya. Dapatkah ia membenarkan norma-norma yang mendefinisikan praksis rasional tanpa merujuk pada sumber norma dan telos yang lebih tinggi. Dapatkah ia mempertahankan pembedaan kokoh antara fakta dan nilai dalam konteks nyata penyelidikan dan pengambilan keputusan. Dapatkah ia memendasarkan klaim kuat tentang martabat manusia dan batas-batas yang tak boleh dilanggar yang terus ditegaskan kerangka hukum dan etis. Ataukah, terlepas dari pengakuan netralitas, ia bergantung pada suatu tatanan realitas yang tidak diakuinya. Bagian-bagian berikut akan berargumen bahwa yang terakhir inilah yang terjadi, dan bahwa setiap rezim tata kelola kebenaran yang berkelanjutan membutuhkan arsitektur yang lebih mirip dengan yang diajukan oleh The Cohesive Tetrad, di mana Sabda dan logika diintegrasikan alih-alih dipertentangkan.

3. Regres pembenaran dan batas-batas pemendasaran diri

Jika logika murni hendak berfungsi sebagai arsitektur berdaulat bagi tata kelola kebenaran, ia harus melakukan lebih dari sekadar menawarkan seperangkat alat yang berguna. Ia harus sanggup membenarkan norma-norma dasar yang mendefinisikan praktik rasional. Jika tidak, klaimnya atas otoritas epistemik akan bertumpu pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat ia pertahankan berdasarkan standarnya sendiri. Pertanyaan intinya mudah dirumuskan namun sulit dijawab: dapatkah norma-norma yang justru membuat penyelidikan rasional menjadi mungkin dipendasarkan oleh prosedur-prosedur yang mereka sendiri mungkinkan.

Bagian ini berargumen bahwa, bila diambil menurut istilah-istilahnya sendiri, logika murni tidak dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Ketika ia mencoba membenarkan norma-norma dasarnya, ia berhadapan dengan trilema yang sudah dikenal. Entah ia meluncur ke dalam regres tak berhingga dari alasan-alasan yang kian dasar, atau ia bergerak dalam lingkaran yang mengandaikan apa yang ingin dibuktikan, atau ia berhenti pada sebuah stipulasi yang sekadar menyatakan bahwa norma tertentu bersifat dasar. Perdebatan dalam epistemologi tentang problem regres menunjukkan bahwa suatu bentuk komitmen dasar tidak terhindarkan (BonJour, 1985; Klein, 1998; Audi, 1993). Yang khas dalam konteks ini adalah bahwa komitmen-komitmen yang dimaksud bukan menyangkut keyakinan-keyakinan partikular tentang dunia, melainkan norma-norma kejujuran, keterbukaan, dan responsivitas terhadap evidensi itu sendiri yang membuat praktik penyelidikan menjadi mungkin. Begitu hal ini terlihat, arsitektur logika murni mulai tampak kurang mandiri dibanding citranya sendiri.

3.1 Norma dasar dalam praktik rasional

Setiap praktik penalaran yang konkret sudah bertumpu pada norma-norma yang bukan hasil dari potongan penalaran tertentu. Ilmuwan mengandalkan lebih dari sekadar instrumen dan persamaan. Mereka mengandaikan bahwa kecurangan itu salah, bahwa penggunaan selektif atas data merupakan keburukan intelektual, bahwa keberatan serius layak mendapat jawaban, dan bahwa kritik bukan penghinaan melainkan disiplin yang perlu. Hakim dan pengacara mengandalkan lebih dari sekadar undang-undang dan yurisprudensi. Mereka mengandaikan bahwa perkara yang serupa harus diperlakukan serupa, bahwa para pihak harus didengar, dan bahwa manipulasi evidensi tidak kompatibel dengan panggilan profesi hukum.

Norma-norma ini bukan ideal pilihan yang menghiasi suatu praktik yang pada dasarnya netral. Ia konstitutif bagi apa artinya sungguh-sungguh menganggap kebenaran itu penting. Tanpa norma-norma tersebut, penalaran mungkin berlanjut dalam arti teknis, tetapi ia berhenti

menjadi penyelidikan dalam makna penuh yang dibayangkan para epistemolog dan filsuf sains ketika mereka berbicara tentang pengetahuan dan pemahaman (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007).

Para epistemolog kebajikan berargumen bahwa sifat-sifat karakter intelektual seperti kejujuran, keberanian intelektual, dan cinta kebenaran bukan tambahan moral eksternal pada suatu prosedur rasional yang sudah mandiri, melainkan bagian internal dari praktik penalaran yang baik itu sendiri (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011). Jika sebuah komunitas meninggalkan sifat-sifat ini, metode-metodenya mungkin tetap ada, tetapi otoritasnya kosong. Poin ini dapat diekspresikan dalam bahasa prosedural, tetapi substansinya tetap sama. Rasionalitas menuntut seperangkat komitmen praktis dan disposisional yang tidak dapat direduksi menjadi relasi formal antarklaim.

Dari sudut pandang logika murni, namun demikian, komitmen-komitmen ini sendiri harus terbuka terhadap tuntutan pembenaran. Jika hanya apa yang dapat ditunjukkan melalui evidensi dan argumen yang dihitung sebagai wajib secara rasional, maka kewajiban untuk mengatakan yang benar, menghindari penipuan diri, dan tunduk pada kritik, secara prinsip, harus dapat ditopang oleh alasan-alasan lebih lanjut. Menjawab bahwa norma-norma ini sekadar jelas atau swabukti mungkin akurat secara psikologis bagi banyak pelaku, tetapi jawaban ini sulit diselaraskan dengan evidensialisme keras yang kerap menyertai ideologi logika murni (Clifford, 1877; Conee and Feldman, 2004).

Akibatnya adalah sebuah ketegangan. Logika murni bergantung pada norma-norma dasar praktik rasional, namun standar-standarnya sendiri tampak melarang penerimaan norma-norma tersebut tanpa alasan dari jenis yang tepat. Subbagian berikut mempertimbangkan tiga strategi untuk menyelesaikan ketegangan ini dan berargumen bahwa masing-masing gagal menyediakan bentuk pemendasaran diri yang dijanjikan secara implisit oleh logika murni.

3.2 Regres, sirkularitas, dan stipulasi

Strategi pertama adalah menerima suatu regres tak berhingga dari pembenaran. Dalam pandangan ini, setiap norma dapat dan seharusnya didukung oleh norma yang lebih dasar. Kewajiban untuk melaporkan data secara jujur dibenarkan oleh kewajiban yang lebih umum untuk menghindari penipuan. Kewajiban itu dibenarkan lagi oleh komitmen yang lebih dasar untuk menghormati pribadi, dan seterusnya tanpa akhir. Secara prinsip, selalu ada alasan yang lebih dalam untuk dicari.

Para epistemolog telah lama mencatat bahwa regres semacam ini bukan, dengan sendirinya, bantahan terhadap rasionalitas, tetapi ia menimbulkan kekhawatiran serius tentang penutupan dan kelayakhunian (BonJour, 1985; Klein, 1998). Dalam istilah praktis, tidak ada penyelidik yang dapat melacak rantai semacam itu hingga tak berhingga. Dalam istilah arsitektural, sebuah sistem yang tak pernah mencapai tingkat di mana alasan berujung pada sesuatu yang bukan sekadar alasan lebih lanjut berisiko merongrong otoritasnya sendiri. Jika logika murni bersikeras bahwa tak satu pun norma boleh diperlakukan sebagai mengikat kecuali didukung oleh rantai alasan yang benar-benar terartikulasikan, ia menjadikan praktik penyelidikan mustahil. Jika ia melonggarkan tuntutan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya ia sudah mengakui bahwa beberapa norma harus diperlakukan sebagai dasar dalam arti yang lain.

Strategi kedua adalah merangkul suatu bentuk sirkularitas. Di sini, norma-norma praktik rasional dikatakan dibenarkan oleh keberhasilan praktik yang mereka topang. Argumennya mengambil bentuk yang sudah dikenal. Karena metode yang menghargai evidensi, kejujuran, dan keterbukaan terhadap kritik telah menghasilkan pengetahuan yang andal dan kekuatan teknologi, kita punya alasan yang baik untuk mempercayai norma-norma yang memandunya. Praktik itu memvalidasi kaidahnya sendiri melalui buah-buahnya.

Garis ini memiliki daya tarik intuitif, dan epistemologi pragmatis telah mengembangkan versinya yang canggih (Dewey, 1938; Putnam, 2002). Namun bila logika murni mengambil standar-standarnya sendiri secara serius, lingkaran ini bermasalah. Penilaian tentang apa yang dihitung sebagai keberhasilan, praktik mana yang sungguh andal, dan buah mana yang penting sendiri dipandu oleh norma-norma yang sedang dipersoalkan. Tanpa komitmen awal terhadap kebenaran sebagai kebaikan yang sungguh, terhadap keterpahaman dunia, dan terhadap ketakbolehterimaan moral penipuan, fakta mentah bahwa prosedur tertentu menghasilkan prediksi atau kendali terbuka bagi penafsiran yang sangat berbeda, termasuk penafsiran instrumental murni yang memutus keberhasilan dari kebenaran (Rea, 2018). Sirkularitas ini dapat bersifat bajik dalam pengertian equilibrium reflektif yang rendah hati (Rawls, 1999), tetapi ia tidak menyediakan jenis pembenaran linear yang tampak dituntut evidensialisme keras.

Strategi ketiga adalah stipulasi. Di sini, pembela logika murni menyatakan bahwa norma-norma tertentu sekadar mendefinisikan apa artinya bernalar. Menolak kejujuran, koherensi, atau responsivitas terhadap evidensi berarti melangkah keluar dari komunitas agen rasional. Dalam epistemologi kontemporer, langkah ini muncul dalam pembicaraan tentang komitmen dasar atau hinge commitments yang bukan produk inferensi, tetapi telah diprasangkaikan oleh setiap upaya meragukan atau bernalar sama sekali (Wittgenstein, 1969; Pritchard, 2016). Dalam register ini, seseorang dapat mengatakan bahwa kewajiban menghindari kontradiksi diri atau peduli pada kebenaran bukan bahan perdebatan. Ia bersifat konstitutif.

Ada sebuah wawasan penting di sini. Banyak upaya untuk membenarkan norma-norma dasar dengan merujuk pada alasan yang lebih dasar adalah keliru, karena tindakan mencari alasan itu sendiri sudah mengandaikan norma-norma tersebut. Namun, jika ideologi logika murni mengakui hal ini, ia juga harus mengakui bahwa standar pembenarannya sendiri memiliki batas. Setidaknya beberapa norma diterima bukan karena memenuhi kriteria evidensial dengan cara yang sama seperti klaim empiris biasa, melainkan karena norma-norma itu merupakan bagian dari bentuk hidup yang di dalamnya kriteria tersebut memiliki makna. Begitu ini diakui, gambaran logika murni sebagai arsitektur rasionalitas yang memendasarkan diri mulai larut.

Trilema ini bukan permainan kata. Ia mencatat sebuah kesulitan struktural. Entah logika murni menuntut pembenaran atas setiap norma dan dengan demikian menghancurkan kondisi-kondisi kemungkinannya sendiri, atau ia menerima sebagian norma sebagai dasar dan mengakui bahwa metode-metodenya sendiri tidak menjelaskan mengapa norma-norma itu mengikat. Rujukan pada regres tak berhingga, pada keberhasilan praktis, atau pada stipulasi masing-masing melunakkan pukulan dengan cara yang berbeda, tetapi tidak satu pun menyediakan bentuk kuat pemendasaran diri yang dibutuhkan oleh arsitektur rasionalitas yang berdaulat.

3.3 Kepercayaan, keterpahaman, dan kemunculan awal Sabda

Pendekatan lain adalah mundur selangkah dari tuntutan bahwa setiap komitmen harus ditopang oleh alasan lebih lanjut. Sejumlah filsuf abad kedua puluh menyarankan bahwa praktik rasional bertumpu pada dasar kepercayaan atau iman yang bukan irasional, tetapi juga bukan hasil argumen dalam pengertian biasa (Wittgenstein, 1969; Polanyi, 1958; Zagzebski, 2012). Menyelidiki sama sekali berarti hidup seolah-olah dunia itu terpahami, seolah-olah kebenaran adalah kebaikan yang sejati, seolah-olah orang lain adalah calon pengetahu alih-alih sekadar penghalang, dan seolah-olah penipuan diri adalah pengkhianatan terhadap sesuatu yang lebih dari sekadar preferensi pribadi.

Ini bukan hipotesis empiris tentang bagaimana dunia kebetulan berperilaku. Praanggapan-praanggapan ini membentuk apa yang dihitung sebagai evidensi dan bagaimana evidensi harus ditafsirkan sejak awal. Mereka bukan pilihan bagi siapa pun yang sungguh-sungguh ingin mengetahui. Bahkan penjelasan rasionalitas yang paling deflasionis sekali pun harus mengandaikan semacam kepercayaan pengarah seperti ini, jika tidak, rasionalitas runtuh menjadi permainan instrumental murni yang manipulatif.

Dilihat dari dalam kerangka logika murni, kepercayaan semacam itu dapat diakui secara deskriptif. Ia dapat dipaparkan sebagai prasyarat psikologis atau kultural bagi penyelidikan, barangkali dijelaskan melalui mekanisme evolusioner atau sosial yang mendukung kerja sama dan standar bersama (Kitcher, 1993; Sterelny, 2012). Namun jenis penjelasan ini menggeser pokok persoalan. Ia menuturkan kisah tentang bagaimana disposisi tertentu mungkin muncul dan menyebar. Ia tidak menjawab pertanyaan normatif apakah disposisi tersebut merupakan respons yang pantas terhadap bagaimana realitas sebenarnya.

Argumen artikel ini adalah bahwa pada titik ini kosakata yang berbeda menjadi perlu. Kepercayaan-kepercayaan dasar yang menopang praktik rasional lebih baik dipahami sebagai respons terhadap sebuah panggilan ketimbang sebagai kebiasaan beruntung. Kepercayaan-kepercayaan itu, betapapun tidak sempurna, mengungkapkan bahwa realitas tidak bersikap acuh terhadap kebenaran dan bahwa manusia bukan pembawa acak dari dorongan tak terjelaskan untuk mengetahui. Kepercayaan-kepercayaan itu mengisyaratkan bahwa dunia ditata sedemikian rupa sehingga mencari kebenaran dan menghormati pribadi bukan hanya berguna secara lokal, tetapi patut (fitting).

Nama Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diajukan sebagai cara menandai dimensi ini. Pada tahap ini, klaimnya berskala terbatas namun berimplikasi kuat. Jika norma-norma praktik rasional dan aksioma-aksioma minimal martabat manusia lebih dari sekadar konvensi lokal, maka harus ada suatu sumber yang sekaligus mendasari dan menyapa norma-norma tersebut. Logika murni, yang terikat oleh kendala naturalistik dan evidensialnya sendiri, tidak dapat secara meyakinkan menduduki peran itu. Ia tidak dapat sekaligus menjadi ciptaan dari norma-norma ini dan pencipta terakhirnya.

Menyadari hal ini tidak menuntut penelantaran logika atau pelemahan standar argumen. Sebaliknya, kesadaran ini memperjelas kondisi di mana logika dapat berfungsi sebagai logika. Begitu ketergantungan praktik rasional pada suatu sumber yang lebih dalam dari norma dan telos diakui, beban yang ditanggung logika murni menjadi lebih ringan. Logika tidak lagi harus mencoba mengangkat dirinya sendiri dari lumpur dengan menarik tali sepatunya. Ia dapat

beroperasi sebagai organ disipliner bagi kritik dan klarifikasi di dalam sebuah arsitektur yang lebih luas.

Bagian berikutnya mengambil satu pilar lain dari ideologi logika murni, yakni pemisahan fakta dan nilai, dan menunjukkan bagaimana bahkan di sana normativitas yang terbenam menunjuk melampaui deskripsi diri logika murni. Ketika batas antara apa yang ada dan apa yang seharusnya diperiksa dalam konteks institusional yang konkret, batas itu ternyata jauh lebih berpori daripada yang diakui ideologi. Hal ini pun akan mempersiapkan jalan bagi peran Sabda yang lebih eksplisit dan bagi arsitektur alternatif yang diajukan di bagian-bagian selanjutnya.

4. Fakta, nilai, dan normativitas yang terbenam

Ideologi logika murni sangat bergantung pada pembedaan yang percaya diri antara fakta dan nilai. Fakta menggambarkan bagaimana dunia adanya. Nilai mengekspresikan bagaimana dunia seharusnya atau apa yang layak dikejar. Dalam gambaran ini, sains dan praktik berbasis evidensi lainnya menangani fakta, sementara pertanyaan tentang tujuan dan prioritas diserahkan kepada politik, kebudayaan, atau keyakinan privat. Daya tarik konseptual dari pembagian ini mudah dipahami. Ia seolah melindungi penyelidikan dari kontroversi moral dan religius, serta melindungi warga dari pemaksaan doktrin komprehensif dalam kehidupan publik.

Bagian ini berargumen bahwa pemisahan fakta–nilai yang ketat, sebagaimana dituntut oleh logika murni, tidak dapat dipertahankan dalam praktik penyelidikan dan pengambilan keputusan yang nyata. Begitu kita memeriksa bagaimana agenda riset ditetapkan, bagaimana konsep hukum dan kebijakan berfungsi, dan bagaimana institusi berbicara tentang martabat dan kerugian, menjadi jelas bahwa normativitas bukan lapisan tambahan yang opsional. Ia hadir dalam seleksi fakta, dalam bahasa deskripsi, dan dalam standar kecukupan. Alih-alih sebuah batas yang bersih, kita menemukan apa yang disebut Hilary Putnam sebagai keterjeratan fakta dan nilai pada berbagai tingkat kognisi dan praktik (Putnam, 2002). Saya menggambarkan keterjeratan ini di bawah tiga subjudul: batas berpori antara fakta dan nilai dalam praktik, peran konsep tebal dan kosakata hibrida, serta normativitas sunyi dalam bahasa institusional modern.

4.1 Batas berpori dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan yang nyata

Dalam diskusi abstrak, menggoda untuk membayangkan penyelidikan sebagai proses dua langkah. Pertama, kita menemukan fakta dengan metode bebas nilai. Kedua, kita berembuk tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta tersebut. Dalam kerja riset dan kebijakan yang nyata, proses ini jauh lebih berjalin. Jauh sebelum data dikumpulkan, penilaian nilai sudah membentuk struktur penyelidikan itu sendiri.

Dalam sains, pilihan harus dibuat tentang fenomena mana yang layak diselidiki, pertanyaan mana yang mendesak, variabel mana yang diukur, dan keluaran mana yang dihitung signifikan. Pilihan-pilihan ini dipandu oleh penilaian tentang kepentingan, risiko, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Pilihan-pilihan tersebut tidak didikte alam secara netral. Para filsuf sains telah menunjukkan secara rinci bagaimana nilai latar membimbing pemilihan masalah, perumusan hipotesis, dan adopsi standar evidensi, terutama dalam konteks di mana kesalahan memiliki biaya moral yang asimetris (Anderson, 2004; Douglas, 2009).

Hal yang sama berlaku dalam kebijakan publik dan hukum. Ketika pemerintah mengevaluasi suatu intervensi kesehatan, mereka tidak hanya bertanya apakah suatu terapi menurunkan biomarker tertentu. Mereka harus memutuskan apa yang dihitung sebagai manfaat, bagaimana menimbang efek samping, bagaimana menyeimbangkan kepentingan kelompok yang berbeda, dan horizon waktu mana yang relevan. Ketika pengadilan menafsirkan standar seperti kewajaran (reasonableness) atau proporsionalitas, mereka tidak dapat menghindari penilaian tentang kepentingan mana yang patut diberi bobot lebih besar dan bentuk risiko mana yang dapat diterima secara sosial (Dworkin, 1986; Habermas, 1996). Ini bukan sekadar persoalan faktual. Semua ini mengandaikan suatu pandangan tentang apa yang baik bagi manusia dan bagaimana beban serta manfaat seharusnya didistribusikan.

Bahkan pada tingkat pilihan yang tampak teknis, seperti penetapan ambang signifikansi dalam statistika atau fungsi kerugian (loss function) dalam pembelajaran mesin, pertimbangan normatif meresap ke dalam desain. Pilihan antara meminimalkan false positive atau false negative bukan hanya soal kenyamanan matematis. Dalam diagnosis medis, peradilan pidana, atau penilaian kelayakan kredit, bobot relatif atas dua jenis kesalahan itu mencerminkan penilaian tentang kepentingan siapa yang lebih penting dan bentuk ketidakadilan mana yang lebih berat (Douglas, 2009; Jobin, Ienca, and Vayena, 2019).

Para pembela dikotomi fakta–nilai kadang mengakui bahwa nilai membentuk konteks penemuan dan konteks penerapan, tetapi tetap mempertahankan bahwa masih ada satu "konteks pembenaran" inti yang bebas nilai. Setelah pertanyaan ditetapkan dan metode dipilih, demikian klaim mereka, penilaian atas evidensi dan penarikan kesimpulan dapat berlangsung tanpa masukan normatif lebih lanjut.

Namun, sebagaimana telah diperdebatkan Putnam dan para pemikir lain, bahkan klaim yang lebih moderat ini sulit dipertahankan (Putnam, 2002; Anderson, 2004). Model mana yang dinilai cukup sederhana, analogi mana yang dipandang relevan, sumber mana yang dihitung kredibel, dan evidensi mana yang dianggap sebagai pembatal (defeater) semuanya dipengaruhi oleh penilaian nilai latar. Pembedaan antara sinyal dan derau, atau antara outlier dan anomali yang bermakna, tidak ditentukan oleh data saja. Pembedaan ini mencerminkan asumsi tentang apa yang penting dan risiko macam apa yang layak diterima.

Kesimpulannya bukan bahwa "apa saja boleh" atau bahwa fakta hanyalah proyeksi nilai. Kesimpulannya adalah bahwa praktik faktual sudah distrukturkan oleh pertimbangan normatif sejak awal. Aspirasi untuk mempertahankan sebuah zona yang murni faktual, terisolasi dari nilai, tidak menggambarkan penyelidikan yang nyata. Aspirasi itu menggambarkan sebuah idealisasi yang, jika diperlakukan sebagai cerminan harfiah, justru mengaburkan cara pengetahuan sebenarnya diproduksi dan digunakan.

4.2 Konsep tebal dan kosakata hibrida

Tekanan kedua terhadap pemisahan fakta–nilai yang ketat berasal dari analisis atas konsep tebal (thick concepts). Bernard Williams dan yang lain menyoroti istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari dan bahasa institusional yang sekaligus mendeskripsikan dan mengevaluasi, seperti kejam, berani, adil, korup, eksploitatif, atau merendahkan martabat (degrading) (Williams, 1985; Putnam, 2002). Ketika kita menyebut suatu tindakan kejam, kita bukan pertama-tama melaporkan pola perilaku netral lalu menambahkan penilaian nilai secara terpisah. Deskripsi

dan evaluasi menyatu. Memahami istilah semacam ini berarti, antara lain, menangkap titik evaluatifnya.

Wacana moral dan hukum modern sangat bergantung pada konsep tebal. Sistem hukum berbicara tentang due process, diskriminasi, perlakuan yang merendahkan martabat (degrading treatment), dan itikad baik (good faith). Kode etik profesi berbicara tentang kelalaian, integritas, penghormatan, dan penyalahgunaan. Instrumen hak asasi manusia internasional melarang perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, bahasa yang sekaligus memiliki daya deskriptif dan evaluatif (UN, 1948; Waldron, 2012). Dalam perdebatan tentang teknologi dan kecerdasan buatan, istilah seperti manipulasi, pengawasan (surveillance), pemberdayaan (empowerment), dan eksklusi memainkan peran serupa (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; UNESCO, 2021).

Jika logika murni bersikeras pada pemisahan fakta–nilai yang tajam, ia menghadapi dilema. Entah ia harus mencoba merekonstruksi konsep tebal sebagai kombinasi deskripsi faktual "tipis" plus sikap nilai yang berdiri sendiri, atau ia harus memperlakukan konsep tebal sebagai ekspresi non kognitif atas persetujuan dan penolakan. Keduanya tidak memuaskan.

Opsi rekonstruktif cenderung mengupas kedalaman konsep tebal. Misalnya, seseorang dapat mencoba mendefinisikan kekejaman semata-mata sebagai penimpaan penderitaan berat tanpa pembenaran. Namun apa yang dihitung sebagai "berat", "tanpa pembenaran", dan "respon yang pantas" sendiri dibentuk oleh pemahaman evaluatif. Menganalisis korupsi semata sebagai pelanggaran norma hukum atau deviasi dari aturan eksplisit mengabaikan pengertian bahwa korupsi menyangkut pengkhianatan terhadap ekspektasi yang sah dan penyalahgunaan amanah kekuasaan. Konten evaluatif bukan tambahan eksternal. Ia konstitutif bagi makna istilah-istilah ini dalam praktik yang memberinya kehidupan (Williams, 1985; MacIntyre, 1988).

Opsi non kognitif, yang diasosiasikan dengan bentuk-bentuk emotivisme dan ekspresivisme tertentu, memperlakukan konsep tebal sebagai cara ter elaborasi untuk mengekspresikan sikap. Dalam pandangan ini, menyebut suatu rezim korup atau suatu praktik merendahkan martabat bukan menyatakan fakta tentang dunia, melainkan mengungkapkan sebuah posisi terhadapnya. Meskipun para ekspresivis kontemporer telah mengembangkan uraian canggih tentang bagaimana sikap-sikap semacam itu dapat tertanam dalam praktik normatif, pendekatan ini sukar dipadukan dengan cara konsep tebal digunakan dalam hukum dan kebijakan. Tuduhan korupsi, eksploitasi, atau ketidakadilan umumnya tidak diajukan sebagai sekadar ekspresi perasaan. Tuduhan-tuduhan itu dikemukakan sebagai klaim yang dapat diperdebatkan, didukung oleh evidensi, dan disanggah sebagai keliru (MacIntyre, 1988; Putnam, 2002).

Dengan demikian, konsep tebal menyingkap suatu ranah di mana pembedaan fakta–nilai runtuh pada tingkat bahasa itu sendiri. Perangkat konseptual kita dipenuhi istilah yang aspek deskriptif dan evaluatifnya tidak dapat dipisahkan secara rapi tanpa distorsi. Ini tidak membuktikan bahwa semua fakta sarat nilai, tetapi melemahkan gagasan bahwa kategori-kategori paling penting dalam hukum, etika, dan kebijakan dapat dibagi bersih menjadi "inti netral" dan elemen nilai yang dapat dilepaskan.

4.3 Normativitas sunyi dalam bahasa institusional

Indikasi ketiga bahwa normativitas terbenam, alih-alih absen, datang dari bahasa resmi institusi modern. Deklarasi hak asasi manusia, pembukaan konstitusi, kode etik kedokteran, dan laporan

tata kelola global secara berulang memakai istilah-istilah seperti martabat, kesetaraan, integritas, otonomi, dan kebebasan. Istilah-istilah ini tidak dikenalkan sebagai slogan belaka. Istilah-istilah ini diperlakukan sebagai gagasan dasar yang mengarahkan dan membatasi desain kerangka hukum dan kebijakan (Dworkin, 1986; Waldron, 2012; Nussbaum, 2006).

Dari dalam kerangka naturalistik dan logika murni, ada dua strategi utama untuk menangani bahasa semacam itu. Strategi pertama bersifat deflasionis: menafsirkan istilah seperti martabat dan kesetaraan sebagai nama singkat yang berguna bagi gugus kepentingan, kapabilitas, atau perlindungan yang disepakati secara kontraktual. Dalam pandangan ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menggambarkan suatu tatanan norma yang bersifat kontingen secara historis tetapi berguna secara pragmatis untuk menopang kerja sama internasional dan keamanan dasar (Rawls, 1999; Nussbaum, 2006). Strategi kedua bersifat genealogis: menjelaskan bahasa dignitarian sebagai residu tradisi religius dan metafisis yang dahulu memberinya isi yang lebih tebal. Dalam konteks sekuler, istilah-istilah tersebut bertahan karena inersia, meski justifikasi aslinya tak lagi diterima (Habermas, 2008; Taylor, 2007).

Kedua strategi ini memiliki daya jelaskan tertentu, tetapi keduanya sulit dipadukan dengan cara bahasa dignitarian sebenarnya berfungsi. Ketika instrumen hukum menyatakan bahwa semua manusia memiliki martabat dan nilai yang melekat serta setara, pernyataan ini tidak dipresentasikan sebagai kompromi sementara atau sebagai fakta historis belaka. Pernyataan itu dikemukakan sebagai kebenaran yang menuntut kesetiaan dan yang tidak seharusnya dinegosiasikan ulang ketika keadaan berubah. Ketika etika kedokteran menegaskan bahwa pasien tidak boleh diperlakukan semata sebagai alat, ia mengartikulasikan sebuah kendala yang dimaksudkan untuk tetap berlaku bahkan ketika pelanggarannya tampak menghasilkan manfaat agregat yang lebih besar (Kant, 1996; Beauchamp and Childress, 2019).

Lebih jauh, para pelaku institusional sering bergantung pada kekuatan istilah-istilah ini untuk mengkritik hukum dan kebijakan yang ada. Rujukan kepada martabat dan kesetaraan dasar menjadi pusat perjuangan melawan perbudakan, apartheid, dan diskriminasi sistematis. Dalam konteks ini, martabat bukan ringkasan konvensi yang ada. Ia adalah standar untuk menilai dan kadang mengutuk konvensi (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Menjelaskan peran ini sepenuhnya dalam istilah naturalistik atau genealogis berisiko menyepelekan daya moral yang dibawa bahasa tersebut dalam praktik.

Ketegangan ini terasa dalam disonansi antara retorika institusional dan pengalaman hidup. Ketika individu diberi tahu bahwa mereka menikmati martabat yang tak dapat dicabut, tetapi berhadapan dengan sistem yang memperlakukan mereka sebagai titik data, sebagai tenaga kerja yang dapat dibuang, atau sebagai risiko keamanan, mereka merasakan bukan sekadar kegagalan instrumental, melainkan pelanggaran atas sesuatu yang lebih dalam. Pelanggaran itu tidak tertangkap oleh kategori deskriptif semata. Ia terdaftar dalam Qualia penghinaan, eksklusi, dan luka moral, dan memanggil penilaian yang diungkapkan dengan istilah evaluatif yang tebal.

Dari sudut pandang logika murni, pengalaman dan penilaian semacam ini dapat diakui sebagai fakta sosiologis tentang bagaimana orang merespons institusi. Pengalaman dan penilaian itu dapat diukur, dimodelkan, dan barangkali dikelola. Yang lebih sulit, mengingat kendala saintisme, evidensialisme keras, dan pemisahan fakta–nilai yang ketat, adalah memperlakukannya sebagai sesuatu yang relevan bagi kebenaran tentang apa itu manusia dan untuk apa manusia ada.

Jika digabungkan, ketiga garis analisis ini menunjukkan bahwa normativitas bukan suplemen opsional yang bisa ditambahkan pada sebuah gambaran faktual tentang penyelidikan dan kehidupan institusional yang pada dasarnya bebas nilai. Norma-norma justru membentuk struktur pertanyaan yang diajukan, kategori yang digunakan, dan apa yang dihitung sebagai keberhasilan. Norma-norma itu tertanam dalam bahasa yang dipakai institusi untuk mengartikulasikan misi dan membenarkan tindakan. Upaya untuk mempertahankan pemisahan fakta–nilai yang ketat sebagai tulang punggung arsitektur tata kelola kebenaran karenanya tidak stabil.

Dalam kerangka artikel ini, ketidakstabilan ini tidak dibaca sebagai alasan untuk meninggalkan standar rasional atau terjerumus ke relativisme. Ketidakstabilan ini dibaca sebagai tanda bahwa setiap arsitektur tata kelola kebenaran yang realistis dan jujur harus mencakup suatu penjelasan tentang sumber dan otoritas norma-norma yang telah diprasangkakan oleh praktik faktual. Jika bahasa kita tentang kekejaman, korupsi, martabat, dan kesetaraan lebih dari sekadar derau ekspresif, maka harus ada suatu tatanan realitas yang kepadanya bahasa itu secara jawab-layan (answerable) merujuk. Bagian berikutnya berargumen bahwa upaya untuk menempatkan tatanan ini sepenuhnya dalam horizon naturalistik, sambil mempertahankan nada tanpa syarat dari martabat manusia dan telos, gagal menurut istilahnya sendiri. Kegagalan itu, pada gilirannya, membuka jalan bagi reintroduksi Sabda sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas, dengan cara yang tidak meniadakan logika, melainkan justru memungkinkan logika beroperasi dengan kesadaran penuh akan ketergantungannya.

5. Martabat, telos, dan keniscayaan Sabda

Bahasa tentang martabat manusia dan tujuan hidup (purpose, telos) telah menjadi pusat dalam hukum, etika, dan kebijakan kontemporer. Instrumen hak asasi manusia internasional menggambarkan martabat sebagai sesuatu yang melekat (inherent) dan tak dapat dicabut (inalienable). Konstitusi nasional dan kode etik kedokteran merujuk pada martabat untuk menandai batas yang tidak boleh dilampaui, bahkan demi mengejar tujuan-tujuan yang tampak diinginkan (UN, 1948; Beauchamp and Childress, 2019). Filsuf moral dan politik semakin menjadikan martabat dan kapabilitas sebagai fondasi lembaga-lembaga yang adil (Kant, 1996; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Pada saat yang sama, ideologi logika murni berupaya memahami istilah-istilah ini dalam horizon naturalistik yang hanya mengakui fakta empiris, kesepakatan rasional, dan praktik sosial yang muncul (emergent) dari proses sejarah.

Bagian ini berargumen bahwa terdapat ketegangan struktural antara cara institusi kontemporer menggunakan bahasa martabat dan telos, dan sumber daya konseptual yang tersedia dalam logika murni untuk membenarkan bahasa tersebut. Ketika martabat dan telos diperlakukan sebagai produk kapasitas, sejarah evolusioner, atau kontrak rasional, nada tanpa syarat yang menyertai keduanya menjadi sulit dipertahankan. Aksioma-aksioma minimal tentang martabat manusia yang diprasangkakan oleh hukum dan etika justru menunjuk pada suatu sumber normatif dan telos yang berdiri di atas proses-proses alam maupun kesepakatan manusia. Sabda, dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menamai sumber tersebut.

5.1 Aksioma-aksioma minimal martabat manusia

Untuk memperjelas apa yang dipertaruhkan, berguna merumuskan seperangkat kecil aksioma minimal tentang martabat manusia yang sudah tersirat dalam banyak kerangka hukum dan etis.

Aksioma-aksioma ini tidak berpretensi menyelesaikan semua perdebatan tentang teori moral. Aksioma-aksioma tersebut justru menangkap komitmen inti yang diekspresikan dalam bahasa hak asasi manusia dan norma-norma profesional yang banyak dianut.

Aksioma pertama adalah nilai yang melekat (inherent worth). Setiap manusia diperlakukan memiliki suatu nilai yang tidak habis dibatasi oleh kegunaan, produktivitas, atau status sosial. Nilai ini bukan fungsi dari harga pasar, bakat, atau kontribusi. Nilai itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh, diperdagangkan, atau hilang secara proporsional dengan kinerja. Dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara eksplisit menegaskan bahwa martabat dimiliki oleh semua manusia semata-mata sebagai manusia (UN, 1948; Waldron, 2012).

Aksioma kedua adalah ketakintersentuhan (inviolability). Ada bentuk-bentuk perlakuan yang dipandang salah pada dirinya sendiri, bukan sekadar tidak diinginkan dalam sebagian besar keadaan. Penyiksaan, penghinaan yang merendahkan martabat, dan reduksi manusia menjadi sekadar alat diperlakukan sebagai larangan kategoris, bukan sebagai opsi yang boleh ditimbang terhadap potensi manfaat. Penegasan Kant bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata sebagai sarana, tetapi selalu juga sebagai tujuan pada dirinya sendiri, adalah artikulasi berpengaruh atas aksioma ini (Kant, 1996). Kode etik modern di bidang kedokteran dan riset membangunnya dengan melarang praktik-praktik yang memperlakukan manusia sebagai sumber daya sekali pakai demi keuntungan ilmiah atau sosial (Beauchamp and Childress, 2019).

Aksioma ketiga adalah kesetaraan dasar (basic equality). Dalam arti yang paling fundamental, klaim moral setiap orang memiliki kedudukan yang setara. Ini tidak berarti bahwa setiap preferensi memiliki bobot yang sama, tetapi bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan seakan-akan penderitaannya tidak dihitung sama sekali. Bahasa tentang kepedulian dan penghormatan yang setara dalam filsafat politik, serta bahasa tentang hak-hak dasar yang setara dalam hukum, mengekspresikan aksioma ini (Dworkin, 1986; Rawls, 1999).

Aksioma keempat menyangkut telos. Hidup manusia diasumsikan terarah kepada kebaikan-kebaikan yang lebih dari sekadar ketertarikan privat. Kebenaran, keadilan, kesetiaan (fidelity), dan kepedulian diperlakukan sebagai kebaikan yang mengajukan klaim atas diri kita, bukan sekadar opsi di antara banyak pilihan. Menyebut seseorang sebagai rusak (corrupted), terdegradasi, atau tidak dimanusiakan mengandaikan bahwa ada cara hidup yang tidak pantas bagi makhluk dari jenis tertentu. Pendekatan kapabilitas dalam filsafat politik, misalnya, menafsirkan keberkembangan manusia (human flourishing) dalam istilah peluang untuk merealisasikan "fungsi-fungsi" (functionings) yang dipandang layak dipilih dan sentral bagi hidup bermartabat (Nussbaum, 2006).

Aksioma-aksioma ini bukan marjinal. Aksioma-aksioma tersebut justru menyusun struktur perdebatan tentang bioetika, peradilan pidana, kebijakan sosial, dan hukum internasional. Pertanyaannya adalah apakah arsitektur logika murni, yang berkomitmen pada saintisme, evidensialisme keras, pemisahan fakta–nilai yang ketat, dan penjelasan naturalistik tentang normativitas, mampu memberikan landasan yang sepadan dengan kekuatan klaim yang sebenarnya dibuat oleh institusi.

5.2 Penjelasan naturalistik tentang martabat dan telos

Di dalam horizon naturalistik, sejumlah strategi telah dikembangkan untuk menjelaskan martabat dan telos tanpa merujuk pada norma orde lebih tinggi apa pun. Masing-masing menyimpan wawasan penting, tetapi masing-masing pula menemui kesulitan ketika diminta menopang aksioma-aksioma minimal yang baru saja diuraikan.

Strategi pertama mendasarkan martabat pada kapasitas, seperti rasionalitas, kesadaran diri, atau otonomi. Dalam pandangan ini, mengatakan bahwa manusia memiliki martabat berarti mengatakan bahwa mereka adalah jenis makhluk yang dapat menentukan tujuan bagi dirinya sendiri, merefleksikan pilihan-pilihannya, dan berpartisipasi dalam pengakuan timbal balik (Kant, 1996; Korsgaard, 1996). Status khusus manusia dengan demikian berakar pada ciri-ciri yang membedakannya dari hewan lain.

Pendekatan ini menangkap intuisi bahwa kapasitas rasional dan reflektif memang penting. Namun pendekatan ini tersandung pada batas-batasnya. Bayi, mereka yang mengalami gangguan kognitif berat, dan orang-orang dalam kondisi demensia lanjut mungkin tidak memiliki kapasitas yang dikatakan sebagai dasar martabat. Jika martabat bergantung pada kepemilikan aktual atas kapasitas semacam itu, maka klaim mereka yang paling rentan tampak lebih lemah justru di titik di mana banyak kerangka moral dan hukum menegaskan bahwa perlindungan harus paling kuat. Upaya merespons dengan merujuk pada kapasitas potensial, keanggotaan spesies, atau kapasitas tipikal memperkenalkan elemen-elemen yang sukar diuraikan tanpa mengundang pemahaman yang lebih tebal tentang "untuk apa" (what for) manusia itu ada (Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Strategi kedua memperlakukan martabat sebagai konstruksi sosial yang berevolusi. Norma melawan kekejaman dan perendahan martabat dijelaskan sebagai respons adaptif yang meningkatkan kerja sama, kepercayaan, dan keberlangsungan kelompok jangka panjang. Bahasa martabat dan hak kemudian ditafsirkan sebagai kristalisasi kultural dari strategi koordinasi yang berhasil. Menyebut seseorang sebagai pembawa martabat, dalam pandangan ini, berarti mengekspresikan komitmen terhadap norma-norma yang terbukti menguntungkan dalam kondisi tertentu (Kitcher, 1993; Sterelny, 2012).

Kisah ini dapat menjelaskan bagaimana praktik tertentu muncul dan bertahan. Kisah ini dapat menjelaskan mengapa banyak masyarakat berkonvergensi pada pembatasan terhadap kekerasan ekstrem. Namun kisah ini tidak dengan mudah membenarkan nada tanpa syarat dari bahasa martabat modern. Jika otoritas norma martabat sepenuhnya bergantung pada kontribusinya terhadap stabilitas atau kemaslahatan kelompok, maka, secara prinsip, norma-norma tersebut dapat ditinjau ulang ketika kondisi berubah. Dalam situasi di mana pelanggaran atas norma martabat dapat secara signifikan meningkatkan prospek kelangsungan hidup, tidak ada sesuatu pun di dalam kisah evolusioner itu sendiri yang melarang pelanggaran tersebut. Gagasan tentang ketakintersentuhan pada terbaiknya menjadi konvensi kuat yang selalu dapat direvisi.

Strategi ketiga menempatkan telos dan martabat dalam kesepakatan rasional. Pendekatan kontraktarian dan deliberatif berpendapat bahwa apa yang dihitung sebagai hak dasar, distribusi yang adil, atau pembatasan kekuasaan yang sah bergantung pada apa yang dapat atau akan disepakati oleh agen bebas dan setara dalam kondisi yang tepat. Manusia memiliki martabat karena mereka harus diperlakukan sebagai calon peserta dalam kontrak rasional

semacam itu. Telos didefinisikan oleh prinsip-prinsip yang akan disetujui di bawah prosedur yang adil atau di balik "tirai ketidaktahuan" (veil of ignorance) (Rawls, 1999; Habermas, 1996).

Kerangka ini menangkap ciri-ciri kunci kesadaran moral modern. Kerangka ini menonjolkan pentingnya pembenaran timbal balik dan alasan publik. Namun kerangka ini juga menghadapi tekanan dari aksioma-aksioma yang berupaya ia landasi. Jika isi martabat dan telos sepenuhnya ditentukan oleh apa yang akan disepakati agen di bawah kondisi tertentu, maka perbedaan tentang kondisi yang sah dapat menghasilkan gambaran yang sangat berbeda tentang apa yang dituntut martabat. Lebih jauh, bila suatu kesepakatan yang secara rasional dapat diterima justru mengesahkan praktik yang oleh banyak orang dipandang merendahkan atau tidak adil, tidak ada standar independen di dalam teori tersebut untuk menyatakan bahwa kesepakatan itu salah. Para penentang yang menolak menerima hasil demikian dengan alasan bahwa hasil itu melanggar suatu norma lebih dalam tentang apa itu manusia menjadi sukar ditempatkan dalam arsitektur ini (Dworkin, 1986; Waldron, 2012).

Dalam setiap kasus, strategi naturalistik dapat menjelaskan sesuatu yang penting tentang praktik moral kita. Pendekatan berbasis kapasitas menyoroti aspek krusial kepribadian. Narasi evolusioner menjelaskan bagaimana kerja sama dan pengekangan dapat muncul. Pendekatan kontraktarian merumuskan ideal keadilan dan resiprositas. Masalahnya bukan bahwa semua pendekatan ini sepenuhnya keliru. Masalahnya adalah bahwa, bila diambil sendiri-sendiri, pendekatan tersebut tidak menopang dimensi tanpa syarat dari martabat dan telos yang tetap diprasangkakan oleh institusi modern.

Jika martabat selalu digandengkan secara ketat dengan kapasitas, maka secara prinsip, sebagian nyawa lebih kurang tak tersentuh daripada yang lain. Jika martabat adalah konstruksi sosial yang berhasil, maka otoritasnya tergantung pada kalkulasi manfaat di masa depan. Jika martabat dan telos adalah produk kontrak, maka keduanya tidak memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada prosedur dan asumsi yang melahirkannya. Dalam setiap kasus, aksioma-aksioma minimal yang diakui oleh hukum dan etika secara diam-diam dilemahkan.

5.3 Sabda sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas

Kesulitannya bukan sekadar teoritis. Kesulitan itu muncul setiap kali individu dan komunitas mengerahkan bahasa martabat dan telos untuk mengkritik hukum dan praktik yang secara formal rasional dan empiris efisien, tetapi dialami sebagai dehumanisasi. Korban penyiksaan, rasisme struktural, atau hubungan kerja yang eksploitatif tidak sekadar mengatakan bahwa tatanan yang ada tidak optimal. Mereka mengatakan bahwa sesuatu telah dilakukan terhadap diri mereka yang tidak selaras dengan apa mereka itu adanya; bahwa mereka diperlakukan dengan cara yang tidak boleh dialami siapa pun. Protes mereka memprasangkakan lebih dari sekadar konvensi lokal atau kontrak kontingen. Protes itu memprasangkakan bahwa ada suatu kebenaran tentang apa manusia itu dan untuk apa manusia ada, yang berdiri menghakimi institusi.

Dari dalam kendala logika murni, protes ini dapat dideskripsikan dan mungkin disimpatikan. Protes ini dapat dimodelkan sebagai reaksi psikologis atau sebagai gerakan sosial. Yang jauh lebih sukar adalah menegaskan bahwa protes tersebut bersentuhan dengan suatu tatanan moral yang nyata, yang bukan sekadar proyeksi preferensi atau sejarah. Untuk melakukan itu, kita

perlu mengakui suatu sumber normatif dan telos yang tidak dapat direduksi menjadi fakta empiris atau kesepakatan rasional.

Sabda, yang di sini dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, menamai sumber demikian. Menginvokasi Sabda berarti menegaskan bahwa manusia bukan pembawa nilai moral secara kebetulan, melainkan makhluk yang disapa, yang martabatnya dianugerahkan oleh suatu realitas yang mendahului dan melampaui mereka. Ini berarti mengatakan bahwa ada cara-cara memperlakukan manusia yang secara intrinsik tidak pantas, bukan karena konsekuensi empirisnya, tetapi karena cara-cara itu bertentangan dengan makna apa itu manusia dalam terang sapaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan martabat, Sabda mendasari klaim bahwa setiap manusia memiliki nilai yang melekat, setara dalam bentuk dasarnya, dan tidak dapat hilang. Nilai ini tidak bergantung pada kapasitas yang dapat melemah, pada kontribusi yang dapat absen, atau pada keanggotaan dalam suatu tatanan politis tertentu. Nilai ini merupakan fungsi dari fakta bahwa manusia dipanggil dan diakui oleh sumber normatif dan telos tersebut. Dalam tradisi teologis, hal ini kerap diungkapkan dengan bahasa penciptaan, pencitraan (image bearing), atau panggilan ilahi. Dalam argumen ini, tekanannya terletak pada peran struktural klaim tersebut, bukan pada perumusan doktrinal spesifiknya.

Dalam kaitannya dengan telos, Sabda mendasari keyakinan bahwa hidup manusia terarah kepada kebaikan-kebaikan yang tidak diciptakan oleh individu atau kolektif. Berbicara tentang panggilan kepada kebenaran, keadilan, dan kesetiaan berarti menegaskan bahwa kebaikan-kebaikan ini layak bagi makhluk seperti kita, bukan sekadar dipilih oleh kita. Ini berarti mengatakan bahwa pola-pola hidup tertentu, betapapun memuaskan secara subjektif, bersifat rusak atau tidak memanusiakan karena menyimpang dari norma yang tertanam dalam realitas tercipta. Tanpa suatu pemahaman telos semacam ini, bahasa tentang korupsi, pengkhianatan, dan dehumanisasi berisiko runtuh menjadi ekspresi frustrasi atas kegagalan proyek, alih-alih menjadi penilaian tentang kehidupan yang tidak pantas.

Dari sudut pandang logika murni, Sabda mungkin tampak sebagai reintroduksi metafisika yang problematik atau otoritas sektarian. Argumen yang dikembangkan dalam artikel ini bergerak ke arah sebaliknya. Logika murni, ketika diambil sebagai arsitektur berdaulat, sudah memprasangkakan norma-norma dan aksioma-aksioma yang tidak dapat dihasilkannya dari komitmen naturalistiknya sendiri. Logika murni bergantung pada kepercayaan-kepercayaan dasar tentang keterterangan (intelligibility) dan kebenaran, dan pada klaim-klaim kuat tentang martabat dan ketakintersentuhan, yang justru menunjuk melampaui batas-batas resminya. Sabda bukan ornamen opsional yang ditambahkan dari luar. Sabda adalah nama bagi tatanan realitas yang harus ada jika norma-norma praktik rasional dan aksioma-aksioma martabat hendak dimaknai lebih dari sekadar kebiasaan lokal.

Mengatakan bahwa Sabda niscaya bukan berarti mengatakan bahwa isi Sabda transparan atau bebas kontroversi. Tafsir atas Sabda dimediasi oleh tradisi, teks, dan komunitas, dan senantiasa rentan terhadap salah baca dan penyalahgunaan. Tepat di sinilah logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment menjadi tak tergantikan. Logika menguji klaim tentang Sabda untuk koherensi dan konsistensi. Qualia merekam pengalaman hidup yang mengalir dari berbagai tafsir. Mistika memperhatikan intensi dan orientasi spiritual dari mereka yang mengklaim berbicara atas nama Sabda, sebagaimana didefinisikan sebagai Mistika, the intentional-spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Akhlak mengevaluasi konfigurasi karakter para penafsir. Intention-Trace Alignment, the

degree of alignment between epistemic intention and epistemic-moral trace, mengaudit jejak moral jangka panjang yang ditinggalkan oleh institusi yang menginvokasi Sabda.

Dalam arsitektur yang diusulkan di bagian-bagian selanjutnya, Sabda mempertahankan primasinya sebagai sumber normatif dan telos yang berotoritas, sementara logika dan domain-domain lain diberikan peran yang sungguh-sungguh, bukan dekoratif, dalam proses penyingkapan dan penilaian kebenaran. Kegagalan logika murni untuk meletakkan dasar bagi martabat dan telos tanpa kontradiksi dengan demikian menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih kompleks dan jujur tentang tata kelola kebenaran. Sabda tidak dihadirkan untuk membungkam pertanyaan, tetapi untuk menjelaskan mengapa pertanyaan-pertanyaan itu, khususnya tentang nilai dan tujuan manusia, begitu mendesak.

Bagian berikut mengembangkan usulan positif ini dengan memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai sebuah arsitektur di mana Sabda, logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment ditenun ke dalam suatu tatanan yang koheren. Dalam arsitektur itu, logika tidak didemonisasi dan tidak pula didewakan. Logika justru dikembalikan ke tempatnya yang semestinya sebagai instrumen yang kuat tetapi derivatif, dalam pelayanan kepada suatu kebenaran yang sumber akhirnya terletak pada Sabda.

6. The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran

Jika argumen sejauh ini tepat, logika murni tidak lagi dapat diperlakukan sebagai arsitektur berdaulat dalam tata kelola kebenaran. Logika murni tetap berharga sebagai himpunan teknik, disiplin, dan kebiasaan intelektual, tetapi ia tidak mampu menjamin norma-norma dasarnya sendiri, tidak dapat mempertahankan pemisahan fakta–nilai yang ketat di tataran praktik, dan tidak mampu meletakkan dasar yang memadai bagi klaim kuat tentang martabat manusia dan telos. Bagian ini memaparkan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif yang secara eksplisit mengakui primasi Sabda dan, pada saat yang sama, menetapkan peran yang tepat dan akuntabel bagi logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment.

Tujuannya bukan mengganti satu ideologi dengan ideologi lain, melainkan merumuskan sebuah kerangka yang cukup jelas untuk diuji dengan standar rasionalitas yang ketat. The Cohesive Tetrad berangkat dari keyakinan bahwa domain-domain kebenaran yang selama ini dipisahkan secara artifisial atau disembunyikan di balik bahasa netral harus dinamai, ditata, dan dihubungkan dalam sebuah struktur yang koheren.

6.1 Penamaan dan pelokasian domain

The Cohesive Tetrad dimulai dengan menamai secara eksplisit domain-domain yang selama ini laten dalam analisis terdahulu.

Sabda adalah Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos. Sabda menandai klaim bahwa ada sumber norma dan tujuan yang tidak diciptakan oleh kehendak manusia, baik individual maupun kolektif. Tradisi teologis menggambarkan Sabda dengan bahasa wahyu, perintah, atau tuturan normatif. Dalam kerangka ini, penekanan jatuh pada struktur: norma dan telos datang sebagai sapaan, bukan sebagai produk kecelakaan evolusioner, kontrak sosial, atau preferensi mayoritas.

Logika adalah domain inferensi, struktur argumen, dan uji koherensi. Di sini termasuk teori-teori justifikasi, probabilitas, dan penalaran kausal. Logika menghubungkan premis dengan kesimpulan, menguji konsistensi, dan mengelola relasi antara bukti dan keyakinan (BonJour, 1985; Conee and Feldman, 2004). Dalam arsitektur yang diusulkan, logika tidak lagi diperlakukan sebagai sumber normativitas tertinggi. Logika berfungsi sebagai instrumen disipliner untuk klarifikasi dan kritik.

Qualia menunjuk cara realitas kelembagaan dialami dari dalam: apakah hukum dirasakan sebagai pengakuan atau penghapusan, apakah kebijakan melahirkan rasa aman atau ancaman, apakah teknologi mengkomunikasikan penghormatan atau objektifikasi. Kajian tentang ketidakadilan epistemik dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa dimensi ini bukan sekadar "noise" subjektif, melainkan suatu modus di mana dunia tersingkap bagi subjek moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Qualia merekam dampak konkret tata kelola kebenaran atas kehidupan manusia.

Mistika adalah Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent. Mistika menyangkut orientasi terdalam kehendak epistemik: apakah pengetahuan dicari demi kebenaran atau demi gengsi, apakah kekuasaan dijalankan untuk melayani atau untuk mendominasi. Dalam bahasa epistemologi kebajikan, Mistika berkelindan erat dengan cinta pada kebenaran dan disposisi untuk menempatkan diri di bawah realitas, bukan membengkokkan realitas agar tunduk pada keinginan sendiri (Zagzebski, 1996; Baehr, 2011).

Akhlak merujuk pada konfigurasi relatif stabil dari disposisi moral dalam diri individu dan komunitas: kejujuran, kerendahan hati intelektual, kecermatan, keberanian, dan kebajikan-kebajikan sejenis. Kajian tentang kebajikan intelektual berargumen bahwa kebajikan-kebajikan ini bukan hiasan moral eksternal yang ditempelkan pada rasionalitas yang pada dasarnya sudah selesai, melainkan syarat internal bagi pencarian kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan sekadar permainan argumen (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007). Akhlak membentuk bagaimana Sabda dibaca, bagaimana logika digunakan, dan seberapa serius Qualia serta Mistika diindahkan.

Intention-Trace Alignment adalah derajat keselarasan antara niat epistemik dan jejak epistemik-moral, yaitu antara tujuan epistemik yang dideklarasikan secara publik dan bukti moral jangka panjang yang ditinggalkan praktik kelembagaan. Riset tentang ketidakadilan epistemik, kepercayaan terhadap sains, dan peran sosial kepakaran menegaskan perlunya mengaudit bukan hanya niat yang dinyatakan, tetapi juga pola-pola kerugian dan pengecualian dalam distribusi manfaat dan beban epistemik (Fricker, 2007; Medina, 2013; Douglas, 2009).

Menamai enam domain ini tidak serta merta "menciptakan" entitas baru. Penamaan ini sekadar mengakui secara lebih jujur dimensi-dimensi yang sudah bekerja di dalam sains, hukum, dan teknologi, tetapi kerap disembunyikan di balik kosakata netral atau direduksi ke satu domain dominan, biasanya logika.

6.2 Tata urut vertikal dan horizontal

Arsitektur bukan hanya daftar komponen. Arsitektur menyangkut bagaimana komponen-komponen itu ditata secara vertikal dan horizontal. Perbedaan tegas antara The Cohesive Tetrad dan ideologi logika murni terletak pada tata urut ini.

Secara vertikal, Sabda menempati puncak sebagai sumber norm dan telos. Klaim bahwa manusia memiliki martabat yang tidak boleh dinegosiasikan dan bahwa bentuk-bentuk perlakuan tertentu salah secara intrinsik dipahami sebagai respons terhadap Sabda, bukan sebagai produk evolusi, kontrak, atau konsensus semata (Kant, 1996; Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Penempatan ini tidak menghapus kebutuhan akan tafsir dan uji kritik, tetapi menegaskan bahwa ada sumber normatif yang tidak berasal dari prosedur rasional.

Logika berada pada lapis berikutnya sebagai organ klarifikasi dan kritik. Logika menilai koherensi klaim tentang Sabda, menguji argumen tentang martabat dan telos, dan memeriksa klaim empiris tentang dunia. Dalam arsitektur ini, logika tidak lagi dibebani tugas mustahil untuk menciptakan norma-norma yang ia perlukan agar bisa berfungsi. Tekanan regres, sirkularitas, dan stipulasi yang sebelumnya dikemukakan tidak lagi beroperasi sebagai ancaman terhadap rasionalitas, karena norma-norma dasar diterima sebagai pemberian, bukan dihasilkan dari dalam sistem itu sendiri (BonJour, 1985; Klein, 1998). Logika ditugasi menjaga agar respons manusia terhadap Sabda dan klaim tentang dunia tidak terjerumus ke dalam inkonsistensi dan manipulasi, bukan memvalidasi eksistensinya sendiri.

Qualia dan Mistika membentuk lapisan perantara yang menghubungkan komitmen struktural dengan kehidupan batin dan pengalaman. Qualia mencatat apakah sebuah arsitektur tata kelola kebenaran menghasilkan rasa aman, keadilan, dan penghormatan, atau sebaliknya rasa penghinaan dan ketaknampakan, sejalan dengan temuan kajian ketidakadilan epistemik dan cedera moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Mistika mengevaluasi apakah niat epistemik benar-benar terarah kepada kebenaran dan keadilan, atau diam-diam telah ditangkap oleh motif lain.

Akhlak dan Intention-Trace Alignment menempati lapisan evaluasi jangka panjang. Akhlak meneliti karakter agen dan komunitas yang beroperasi di bawah suatu arsitektur. Intention-Trace Alignment membandingkan niat epistemik yang dideklarasikan dengan jejak moral nyata dari kebijakan, teknologi, dan putusan sepanjang waktu (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007; Douglas, 2009). Bersama-sama, keduanya mencegah arsitektur dinilai hanya dari keanggunan proseduralnya, tanpa mengindahkan konsekuensi kemanusiaan yang bertahan.

Secara horizontal, setiap domain memiliki peran korektif terhadap domain lain ketika domain-domain tersebut menyimpang. Sabda, sebagai kategori, tidak berfungsi sebagai lisensi bagi klaim otoritas apa pun untuk kebal dari uji logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment. Klaim yang menginvokasi Sabda tetapi secara persisten menghasilkan jejak penghinaan dan pengabaian sistematis terhadap aksioma minimal martabat manusia adalah, secara prima facie, patut dicurigai sebagai kesalahtafsiran atau instrumentalisasi Sabda (Waldron, 2012; Nussbaum, 2006). Demikian pula, logika yang menolak memperhatikan Qualia dan Mistika rawan mengeras menjadi legalisme dingin atau teknokrasi. Qualia yang menolak uji logis berisiko terjebak dalam sentimentalisme. Mistika yang tidak diaudit oleh Akhlak dan Intention-Trace Alignment dapat merosot menjadi pencarian kenyamanan spiritual yang menutup mata terhadap ketidakadilan.

The Cohesive Tetrad dengan demikian menghindari dua distorsi yang lazim: monisme, ketika satu domain (lazimnya logika) mengklaim kedaulatan penuh, dan fragmentasi, ketika domain-domain kebenaran beroperasi terpisah tanpa ketegangan terstruktur dan koreksi timbal balik. Arsitektur ini mengakui ketegangan sebagai ciri sehat dalam tata kelola kebenaran, bukan sebagai cacat.

6.3 Menjawab kegagalan struktural logika murni

Dalam kerangka ini, kita dapat kembali meninjau tiga kegagalan struktural logika murni: masalah dasar pembenaran (self grounding), keruntuhan pemisahan fakta–nilai, dan kegagalan meletakkan dasar bagi martabat dan telos.

Pertama, masalah dasar pembenaran. Dalam The Cohesive Tetrad, norma-norma dasar praktik rasional seperti kejujuran intelektual, keterbukaan terhadap koreksi, dan orientasi kepada kebenaran dipahami sebagai respons terhadap Sabda, bukan sebagai produk prosedur yang justru mereka mungkinkan. Hal ini selaras dengan gagasan sejumlah pemikir abad kedua puluh bahwa praktik rasional bertumpu pada bentuk-bentuk kepercayaan (trust) yang tidak lahir dari argumen biasa, tetapi menjadi syarat bagi argumen untuk bermakna (Wittgenstein, 1969; Polanyi, 1958; Zagzebski, 2012). Dengan mengakui Sabda sebagai sumber normatif, arsitektur ini mengakhiri regres pembenaran pada titik yang bukan sewenang-wenang, melainkan secara struktural tepat: di luar sistem inferensial, pada tatanan yang mendasari dan menyapa sistem tersebut.

Logika tidak lagi diminta membuktikan norma-norma yang memungkinkannya berfungsi. Tugasnya adalah memastikan bahwa tafsir manusia atas Sabda dan klaim empiris tentang dunia tetap koheren secara internal dan tanggap terhadap bukti (Haack, 2003; Douglas, 2009). Dalam pengertian ini, logika tidak dikecilkan, melainkan dibebaskan dari peran yang tidak bisa dipenuhinya.

Kedua, fakta dan nilai. The Cohesive Tetrad tidak berupaya mengembalikan dikotomi fakta–nilai yang ketat. Sebaliknya, arsitektur ini menafsirkan fakta sebagai unsur dari tatanan tercipta yang sarat normatif. Analisis Putnam, Anderson, dan Douglas tentang peran nilai dalam sains menunjukkan bahwa penilaian nilai membentuk pemilihan masalah, pembentukan konsep, dan standar bukti (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009). Dalam arsitektur yang diusulkan, kehadiran nilai semacam itu tidak diperlakukan sebagai kontaminasi, tetapi sebagai sesuatu yang harus diakui, ditata, dan dimintai pertanggungjawaban.

Qualia dan Mistika diberi peran formal untuk mencatat bagaimana nilai menyusup ke pengalaman dan niat. Logika membantu menjernihkan relasi di antara dimensi-dimensi ini, bukan mencoba memisahkannya secara artifisial. Sabda menyediakan horizon di mana realitas lebih dari sekadar kumpulan fakta netral, melainkan suatu tatanan yang bermakna dan bertujuan. Integrasi fakta dan nilai dengan demikian berlangsung dalam struktur yang eksplisit, bukan melalui penyelundupan tersembunyi.

Ketiga, martabat dan telos. Analisis sebelumnya atas pendekatan berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian menunjukkan bahwa, dalam horizon naturalistik murni, sulit mempertahankan isi kuat dari klaim tentang martabat yang melekat, tak dapat dicabut, dan batas-batas yang tak boleh dilewati (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). The Cohesive Tetrad memulihkan kekuatan klaim-klaim ini dengan menyajikannya sebagai konsekuensi dari Sabda: manusia dipahami sebagai mereka yang dipanggil dan diakui oleh sumber normatif tertinggi. Aksioma-aksioma minimal martabat manusia diperlakukan sebagai artikulasi eksplisit dari panggilan tersebut.

Akhlak dan Intention-Trace Alignment menjadi instrumen untuk mengaudit sejauh mana sistem hukum, kebijakan, dan teknologi sungguh-sungguh menghormati martabat itu. Ketika

terdapat jarak antara niat yang dinyatakan dan jejak moral yang tampak, jarak ini tidak lagi dibaca semata sebagai inefisiensi teknis, tetapi sebagai gangguan arsitektural dalam relasi terhadap Sabda dan telos yang ia tetapkan (Fricker, 2007; Medina, 2013; UNESCO, 2021).

Dalam semua ini, kedudukan logika tidak diturunkan, melainkan dikonfigurasi ulang. Logika tetap tak tergantikan untuk:

- menguji konsistensi tafsir atas Sabda,
- merinci implikasi praktis aksioma martabat,
- menilai klaim empiris tentang dampak kelembagaan, dan
- menghubungkan data dengan norma dalam cara yang dapat dipertanggungjawabkan di forum publik.

Yang berubah adalah bahwa logika tidak lagi memainkan peran ganda sebagai sekaligus ciptaan dan pencipta norma. Logika beroperasi sebagai organ disipliner di dalam sebuah arsitektur yang mengakui adanya sumber normatif di luar dirinya.

6.4 Trajektori bagi hukum dan kecerdasan buatan

Argumen sejauh ini dikembangkan di tataran filosofis dan konseptual. Sebuah arsitektur tata kelola kebenaran hanya layak mendapat perhatian serius bila ia sanggup membuat perbedaan di medan kelembagaan konkret. The Cohesive Tetrad mulai diuji di dua arena yang sangat peka terhadap klaim rasionalitas dan martabat: hukum dan kecerdasan buatan.

Dalam hukum, sejumlah kajian terbaru menyoroti interaksi persisten antara bahasa hak, martabat, dan keadilan prosedural, serta pertanyaan-pertanyaan dasar tentang sumber otoritas normatif dan batas-batas legitimasi prosedural murni (Habermas, 1996; Dworkin, 1986; Waldron, 2012). The Cohesive Tetrad dapat digunakan untuk:

- membaca ulang peran Sabda dalam tradisi hukum yang eksplisit religius maupun yang telah tersekularisasi,
- memetakan bagaimana logika hukum beroperasi dalam relasinya dengan Qualia para pihak yang terdampak,
- mengevaluasi Mistika dan Akhlak para aktor hukum, dan
- mengaudit Intention-Trace Alignment pengadilan dan lembaga terhadap aksioma martabat yang mereka klaim junjung.

Di bidang kecerdasan buatan, laporan-laporan global tentang etika AI mengakui pentingnya prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun kerap kesulitan memberi uraian mendalam mengapa manusia harus diperlakukan dengan cara tertentu di luar pertimbangan manajemen risiko dan kepercayaan publik (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021). The Cohesive Tetrad menyediakan kerangka untuk:

- menafsirkan prinsip-prinsip tersebut sebagai ekspresi parsial dari panggilan Sabda kepada martabat dan telos,
- menempatkan logika algoritmik di bawah pengawasan ganda Akhlak dan Intention-Trace Alignment, dan

- mengintegrasikan Qualia para pengguna serta Mistika para perancang ke dalam analisis tata kelola, bukan sebagai “noise”, melainkan sebagai data yang relevan secara epistemik.

Pengembangan rinci atas aplikasi-aplikasi ini menjadi tugas kajian terpisah. Untuk keperluan artikel ini, cukup dicatat bahwa The Cohesive Tetrad bukan sekadar skema abstrak. Ia telah berfungsi sebagai lensa dan alat desain di bidang-bidang di mana keterbatasan logika murni kian tampak. Dengan demikian, The Cohesive Tetrad menolak pilihan palsu antara menyerah sepenuhnya kepada ideologi logika murni, yang tidak dapat membenarkan norma-normanya sendiri, dan kembali kepada bentuk-bentuk seruan otoritarian atas wahyu yang menolak audit logis dan moral.

Bagian terakhir artikel ini akan mengikat seluruh jalinan argumen, merangkum bagaimana kritik terhadap logika murni dan usulan The Cohesive Tetrad saling terkait, serta mengisyaratkan bagaimana pergeseran arsitektural ini dapat membentuk ulang perdebatan tentang tata kelola kebenaran dalam hukum, teknologi, dan nalar publik.

7. Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari sebuah ketegangan yang tertanam dalam-dalam di dalam institusi kontemporer. Di satu sisi, aktor-aktor ilmiah, hukum, dan teknologi menggambarkan diri mereka sebagai tunduk pada bukti, kenetralan, dan rasionalitas prosedural. Di sisi lain, aktor-aktor yang sama bergantung pada kosakata tentang martabat manusia, hak-hak dasar, batas-batas yang tak boleh dilanggar, dan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kosakata pertama menyiratkan bahwa logika murni dapat memerintah sendirian. Kosakata kedua mengandaikan adanya sumber norm dan telos yang tidak dapat dihasilkan oleh logika yang beroperasi di dalam horizon naturalistik semata.

Tugas pertama adalah merekonstruksi logika murni, bukan sebagai sosok karikatural, melainkan sebagai arsitektur tata kelola kebenaran yang serius. Dengan bertumpu pada genealogi dari positivisme hingga saintisme kontemporer, dan pada perdebatan dalam epistemologi serta filsafat sains, saya mengidentifikasi empat tesis struktural yang bersama-sama mendefinisikan ideologi logika murni: saintisme, evidensialisme keras, pemisahan ketat fakta–nilai, dan pemahaman naturalistik tentang telos dan martabat (Comte, 1974; Ayer, 1936; Haack, 2003; Putnam, 2002; Rea, 2018). Dalam bentuk terkuatnya, konfigurasi ini menjanjikan sebuah citra otoritas rasional yang terlepas dari wahyu dan tradisi, dan yang dapat mengatur kehidupan publik dalam masyarakat majemuk tanpa merujuk pada doktrin-doktrin komprehensif.

Tugas kedua adalah menunjukkan bahwa arsitektur ini tidak dapat menanggung bobot yang secara implisit ia klaim. Tiga kegagalan struktural muncul. Pertama, logika murni tidak dapat meletakkan dasar bagi norma-norma dasar praktik rasional tanpa jatuh ke dalam regres, sirkularitas, atau stipulasi. Kewajiban untuk mencari kebenaran, menghindari penipuan, dan tunduk pada bukti sudah diprasuposisikan oleh setiap upaya pembenaran yang sungguh-sungguh. Kewajiban-kewajiban ini tidak dapat diturunkan dari prosedur yang justru mereka mungkinkan (BonJour, 1985; Klein, 1998; Zagzebski, 1996). Kedua, pembedaan ketat fakta–nilai larut di dalam praktik inkuiri dan pengambilan keputusan yang konkret. Mulai dari pemilihan masalah hingga standar bukti, penilaian nilai membentuk produksi dan interpretasi fakta, dan konsep-konsep tebal seperti kekejaman, korupsi, dan perlakuan yang merendahkan

menyatukan deskripsi dan evaluasi dengan cara yang menolak pemisahan bersih (Williams, 1985; Anderson, 2004; Douglas, 2009; Putnam, 2002). Ketiga, pemahaman naturalistik tentang martabat dan telos gagal menopang aksioma minimal yang diasumsikan oleh hukum dan etika kontemporer. Strategi-strategi berbasis kapasitas, evolusioner, dan kontraktarian masing-masing menangkap wawasan penting, tetapi tidak satu pun yang mengamankan watak tanpa syarat dari harkat melekat, inviolabilitas, dan kesetaraan dasar yang terus dinyatakan dalam bahasa hak asasi manusia (Kant, 1996; Rawls, 1999; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012).

Kegagalan-kegagalan ini tidak berarti bahwa logika adalah musuh kebenaran. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa logika, ketika diperlakukan sebagai arsitektur berdaulat, sedang diminta melakukan kerja yang tidak dapat ia penuhi tanpa meminjam dari sumber-sumber yang secara resmi ia tolak. Kepercayaan-kepercayaan dasar yang menopang praktik rasional, dan klaim-klaim kuat tentang martabat manusia yang diinvokasi oleh institusi, mengarah melampaui diri mereka sendiri kepada suatu tatanan realitas di mana kebenaran, harga diri, dan tujuan bukanlah kebetulan atau sekadar konstruksi. Nama Sabda, yang dipahami sebagai Revelatory Word, the authoritative source of norm and telos, diperkenalkan sebagai cara untuk menandai tatanan tersebut.

Bertolak dari sini, artikel ini mengusulkan The Cohesive Tetrad sebagai arsitektur alternatif tata kelola kebenaran. Alih-alih memperlakukan logika sebagai asal normativitas, arsitektur ini menempatkan Sabda di puncak tata urut vertikal dan kemudian mengatur logika, Qualia, Mistika, Akhlak, dan Intention-Trace Alignment dalam peran yang berbeda namun saling bergantung. Logika mempertahankan otoritas kritis dan klarifikatifnya. Logika menguji klaim tentang Sabda dari sisi koherensi, memeriksa pernyataan empiris tentang dunia, dan menghubungkan bukti dengan kebijakan dalam bentuk-bentuk yang dapat diaudit (Haack, 2003; Douglas, 2009). Qualia memberi suara pada pengalaman hidup orang dan komunitas di bawah rezim-rezim kebenaran tertentu, termasuk pengalaman ketidakadilan epistemik dan cedera moral (Fricker, 2007; Medina, 2013). Mistika, yaitu Mistika, the intentional–spiritual dimension of journeying toward direct encounter with the transcendent, menyangkut kedalaman dan arah niat epistemik. Akhlak mencerminkan peran kebajikan intelektual dalam menopang inkuiri yang jujur, dan Intention–Trace Alignment mengukur derajat keselarasan antara niat epistemik yang dinyatakan dan jejak epistemik-moral jangka panjang dari praktik kelembagaan (Zagzebski, 1996; Roberts and Wood, 2007).

Kontribusi teoretis artikel ini dapat diringkas dalam tiga gerakan. Pertama, artikel ini membingkai ulang konflik klasik antara rasio dan wahyu sebagai persoalan desain arsitektural. Isunya bukan apakah logika berharga, melainkan apakah logika dapat secara kredibel mengklaim kedaulatan atas norm dan telos. Kedua, artikel ini merumuskan kritik struktural terhadap logika murni yang bersifat internal terhadap keprihatinan-keprihatinannya sendiri. Argumen bergantung pada problem regres dalam pembenaran, pada kajian rinci dalam filsafat sains tentang keterjeratan fakta dan nilai, serta pada pendekatan martabat dan kapabilitas dalam hukum dan etika, bukan pada apel yang sama sekali tak kasat mata dari dalam bidang-bidang tersebut (Putnam, 2002; Anderson, 2004; Douglas, 2009; Nussbaum, 2006; Waldron, 2012). Ketiga, artikel ini memperkenalkan The Cohesive Tetrad sebagai kandidat arsitektur positif di mana Sabda dan logika bukan pesaing, melainkan mitra, masing-masing dengan peran dan batas yang terdefinisi.

Ini bukan akhir argumen, melainkan titik awalnya. Sejumlah lintasan kerja lanjutan segera tampak. Salah satunya menyangkut pengembangan rumusan yang lebih presisi tentang aksioma-aksioma minimal martabat manusia dan relasinya dengan beragam tradisi keagamaan

dan filosofis yang mengklaim memediasi Sabda. Lintasan lain menyangkut elaborasi Akhlak dan Intention–Trace Alignment menjadi instrumen operasional untuk mengaudit institusi dalam sains, hukum, dan teknologi. Lintasan ketiga menyangkut penerapan rinci The Cohesive Tetrad pada domain seperti kecerdasan buatan, di mana bahasa tentang kenetralan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sudah berada dalam tekanan (Jobin, Ienca, and Vayena, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Jika analisis yang ditawarkan di sini secara garis besar tepat, masyarakat kontemporer menghadapi sebuah pilihan yang tidak dapat ditunda tanpa batas. Masyarakat dapat terus berbicara seolah-olah logika murni sudah memadai, sambil diam-diam bergantung pada klaim moral dan dignitarian yang tidak dapat ia benarkan. Kesenjangan antara metafisika resmi dan praktik aktual kemudian akan melebar, dengan risiko melahirkan sinisme terhadap sains maupun hukum. Atau, masyarakat dapat mengakui bahwa logika bukan sumber otoritasnya sendiri, bahwa norma-norma yang mengatur inkuiri yang sungguh-sungguh dan aksioma-aksioma martabat manusia memerlukan dasar yang lebih dalam. The Cohesive Tetrad ditawarkan sebagai salah satu upaya untuk memikirkan seperti apa arsitektur tata kelola kebenaran semacam itu: sebuah arsitektur di mana Sabda memasok norm dan telos, logika berfungsi sebagai bahasa disipliner kritik dan klarifikasi, Qualia dan Mistika menjaga agar institusi tetap peka terhadap realitas hidup dan niat, Akhlak membentuk karakter para pencari tahu, dan Intention–Trace Alignment memastikan bahwa biaya moral dari proses mengetahui tidak pernah disingkirkan dari pandangan.

References

Anderson, E. (2004). Uses of value judgments in science. *Hypatia, 19*(1), 1-24.

Audi, R. (1993). *The structure of justification.* Cambridge University Press.

Ayer, A. J. (1936). *Language, truth and logic.* Gollancz.

Baehr, J. (2011). *The inquiring mind: On intellectual virtues and virtue epistemology.* Oxford University Press.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.

BonJour, L. (1985). *The structure of empirical knowledge.* Harvard University Press.

Carnap, R. (1937). *The logical syntax of language.* Routledge & Kegan Paul.

Clifford, W. K. (1877). The ethics of belief. In W. K. Clifford, *Lectures and essays* (Vol. 2, pp. 177-211). Macmillan.

Comte, A. (1974). *The positive philosophy of Auguste Comte* (H. Martineau, Trans.). University Press of America.

Conee, E., & Feldman, R. (2004). Evidentialism. In E. Conee & R. Feldman, *Evidentialism: Essays in epistemology* (pp. 83-107). Oxford University Press.

Dewey, J. (1938). *Logic: The theory of inquiry.* Henry Holt.

Douglas, H. (2009). *Science, policy, and the value-free ideal.* University of Pittsburgh Press.

Dworkin, R. (1986). *Law's empire.* Harvard University Press.

Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing.* Oxford University Press.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press.

Haack, S. (2003). *Defending science within reason: Between scientism and cynicism.* Prometheus Books.

Hume, D. (1978). *A treatise of human nature* (L. A. Selby-Bigge & P. H. Nidditch, Eds.). Oxford University Press.

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence, 1*(9), 389-399.

Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.

Kitcher, P. (1993). *The advancement of science: Science without legend, objectivity without illusions.* Oxford University Press.

Klein, P. (1998). Foundationalism and the infinite regress of reasons. *Philosophy and Phenomenological Research, 58*(4), 919-925.

Korsgaard, C. M. (1996). *The sources of normativity.* Cambridge University Press.

MacIntyre, A. (1988). *Whose justice? Which rationality?* University of Notre Dame Press.

Medina, J. (2013). *The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and the social imagination.* Oxford University Press.

Mutaqin, A. Z. (2025a). The Cohesive Tetrad: Jalan Menuju Kebenaran. *OSF Preprints.* https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Mutaqin, A. Z. (2025b). The Cohesive Tetrad as an epistemic-ethical framework for truth governance under minimal human dignity axioms. *OSF Preprints.* https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D5S7V

Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership.* Harvard University Press.

OECD. (2019). *Recommendation of the Council on artificial intelligence.* Organisation for Economic Co-operation and Development.

Polanyi, M. (1958). *Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy.* Routledge.

Pritchard, D. (2016). *Epistemic angst: Radical skepticism and the grounds of knowledge.* Princeton University Press.

Putnam, H. (2002). *The collapse of the fact value dichotomy and other essays.* Harvard University Press.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (rev. ed.). Harvard University Press.

Rea, M. C. (2018). *World without design: The ontological consequences of naturalism.* Oxford University Press.

Roberts, R. C., & Wood, W. J. (2007). *Intellectual virtues: An essay in regulative epistemology.* Oxford University Press.

Sterelny, K. (2012). *The evolved apprentice: How evolution made humans unique.* MIT Press.

Stenmark, M. (2001). *Scientism: Science, ethics and religion.* Ashgate.

Taylor, C. (2007). *A secular age.* Harvard University Press.

United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights.* United Nations.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence.* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Waldron, J. (2012). *Dignity, rank, and rights.* Oxford University Press.

Williams, B. (1985). *Ethics and the limits of philosophy.* Harvard University Press.

Wittgenstein, L. (1969). *On certainty* (G. E. M. Anscombe & G. H. von Wright, Eds.). Blackwell.

Zagzebski, L. T. (1996). *Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge.* Cambridge University Press.

Zagzebski, L. T. (2012). *Epistemic authority: A theory of trust, authority, and autonomy in belief.* Oxford University Press.